

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ketersediaan infrastruktur telah diyakini akan memegang peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Dengan hadirnya infrastruktur yang handal maka terwujudnya pemenuhan Hak Dasar Rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan hak-hak lainnya akan terdukung lebih optimal.

Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur selain perlu terus ditingkatkan, juga harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis dengan matang sesuai kondisi dan potensi ekonomi dan sosial serta tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah. Tentunya termasuk dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan yang harus selaras dan bersinergi dengan sektor- sektor lainnya disamping adanya kebersamaan langkah antara Pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi di dalam pelaksanaannya

Kondisi seperti digambarkan tersebut di atas, selaras pula dengan amanat Undang- Undang sektor ke PUPR-an yang meliputi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Sejalan dengan itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah laut Tahun 2018 – 2023 Menetapkan visi yaitu **“Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI”**.

Terkait dengan peran infrastruktur PUPRP di atas serta ditambah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut telah memiliki 4 (empat) tujuan dalam pembangunannya yang akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah, 4 (empat) tujuan tersebut terdiri dari

1. Tujuan Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik dengan sasaran Meningkatkan inovasi pelayanan publik

2. Tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik
3. Tujuan Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas dengan sasaran Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas
4. Tujuan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

KATAPENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap satuan organisasi/kerja, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap satuan organisasi/kerja secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategik organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja. Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepadapublik.

Semua itu memerlukan dukungan dan Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan menuangkan gambaran keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2019. Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Penataan Ruang dan Pertanahan untuk meningkatkan kinerja masing-masing satuan unit kerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan ini telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan Laporan Kinerja ini telah melalui proses diskusi, khususnya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sampai dengan tersusunnya laporan ini, kami mengucapkan terima kasih.

Pelaihari, Januari 2019

P e n y u s u n

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BABI PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	2
C. Kepegawaian	6
D. Isu Strategis DPUPR Kab. Tanah Laut	8
E. Produk dan Layanan	10
F. Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. Visi RPJMD.....	13
B. Misi RPJMD	15
C. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	18
D. Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator, Target 5 Tahun)	28
E. Indikator Kinerja Utama.....	28
F. Program dan Kegiatan DPUPR TA. 2019	33
G. Perjanjian Kinerja DPUPRP Tahun 2019.....	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	44
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PUPRP	44
B. Perbandingan Capaian IKU Dinas PUPRP	62
C. Capaian Sasaran Strategis	72
D. Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Dinas PUPRP.....	74
E. Capaian IKU Eselon 3 Dinas PUPRP.....	76
F. Akuntabilitas Keuangan.....	114

BAB IV PENUTUP	121
A. Simpulan	121
B. Strategi Peningkatan Kinerja	121

DAFTAR GRAFIK

1. Grafik Kualifikasi Pendidikan.....	6
2. Jumlah PNS Menurut Golongan	7
3. Jumlah PNS DPUPRP	8
4. Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Bina Marga.....	64
5. Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang CKJK	66
6. Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Sumber Daya Air	69
7. Perbandingan IKU Dinas pada Bidang Tata Ruang	70
8. Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Pertanahan.....	72

DAFTAR GAMBAR

1. Hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kab. Tanah Laut Pada Periode 2018-2019	17
--	----

DAFTAR TABEL

1. Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kab. Tanah Laut.....	17
2. Keterkaitan Misi Kesatu dengan Tujuan dan Sasaran	19
3. Keterkaitan Misi Kedua dengan Tujuan dan Sasaran	21
4. Keterkaitan Misi Ketiga dengan Tujuan dan Sasaran	22
5. Keterkaitan Misi Keempat dengan Tujuan dan Sasaran	23
6. Keterkaitan Misi Kelima dengan Tujuan dan Sasaran	24
7. Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran DPUPRP Kab. Tanah Laut	27
8. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPUPRP Kab.Tanah Laut	28
9. Indikator Kinerja Utama	45
10. Target Indikator Kinerja Utama	46
11. Capaian Indikator Kinerja Utama	47

12. Capaian per Indikator Sasaran 1	49
13. Capaian per Indikator Sasaran 2	55
14. Capaian per Indikator Sasaran 3	57
15. Capaian per Indikator Sasaran 4	58
16. Capaian per Indikator Sasaran 5	60
17. Capaian per Indikator Sasaran 6	61
18. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2017, 2018 dan 2019.....	62
19. Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Bina Marga	64
20. Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	65
21. Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Sumber Daya Air	68
22. Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Tata Ruang.....	70
23. Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Pertanahan.....	72
24. Capaian Sasaran Strategis	73
25. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017, 2018 dan 2019	74
26. IKU Sekretariat.....	76
27. Target IKU Sekretariat Tahun 2019	76
28. Target dan Capaian IKU Sekretariat Tahun 2019	77
29. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1	78
30. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2.....	79
31. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 3.....	80
32. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 4.....	81
33. IKU Bidang Bina Marga.....	81
34. Target IKU Bidang Bina Marga Tahun 2019	82
35. Target dan Capaian IKU Bidang Bina Marga Tahun 2019	82
36. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1	83
37. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2.....	87
38. IKU Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi.....	88
39. Target IKU Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Tahun 2019.....	89
40. Target dan Capaian IKU Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Tahun 2019.....	90
41. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1	91
42. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2.....	92
43. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 3.....	93

44. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 4.....	94
45. IKU Bidang Tata Ruang	95
46. Target IKU Bidang Tata Ruang Tahun 2019.....	96
47. Target dan Capaian IKU Bidang Tata Ruang Tahun 2019.....	96
48. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1	97
49. IKU Bidang Pertanahan	98
50. Target Bidang IKU Pertanahan Tahun 2018.....	98
51. Target dan Capaian IKU Bidang Pertanahan Tahun 2019.....	99
52. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1	100
53. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2.....	101
54. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 3.....	102
55. IKU Bidang Sumber Daya Air.....	103
56. Target IKU Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019	103
57. Target dan Capaian IKU Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019	104
58. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1	105
59. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2.....	106
60. IKU UPT Peralatan	108
61. Target IKU UPT Peralatan Tahun 2019	108
62. Target dan Capaian IKU UPT Peralatan Tahun 2019	109
63. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1	109
64. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2.....	110
65. IKU UPT Laboratorium.....	111
66. Target IKU UPT Laboratorium Tahun 2019	112
67. Target dan Capaian IKU UPT Laboratorium Tahun 2019	112
68. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1	113
69. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2.....	114
70. Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Sasaran Dinas PUPRP Tahun 2019.....	115
71. Analisis perbandingan Program dan Kegiatan Dinas PUPRP Tahun 2018 dan 2019	116
72. Perbandingan Program dan Kegiatan APBD Tahun 2018 dan 2019	119
73. Perbandingan APBD Tahun 2018 dan 2019.....	120

DAFTAR GAMBAR

1. Visi RPJMD	13
2. Misi RPJMD	15
3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	18

LAMPIRAN

1. IKU DPUPRP Kab. Tanah Laut
2. Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2018
3. Perjanjian Kinerja DPUPRP Tahun 2019
4. Pohon Kinerja
5. Capaian IKU DPUPRP Tahun 2019
6. Capaian Kinerja DPUPRP Tahun 2014 s/d 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah senantiasa menuntut adanya percepatan, terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta Pemerintah juga memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “ good governance “ (kepemerintahan yang baik). Agar “ good governance “ dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya “ alignment “ (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Dalam dunia pemerintahan akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja (LAPKIN) Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja (LAPKIN) Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka (LAPKIN) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan penyusunan (LAPKIN) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan (LAPKIN), yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
2. Inpres Nomor 7 tahun 1969 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
3. Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan

- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
 - 1) Seksi Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai;
 - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan; dan
 - 3) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air.
- c. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Peningkatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3) Seksi Perencanaan Bina Marga.
- d. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi terdiri dari:
 - 1) Seksi Air Bersih dan Sanitasi;
 - 2) Seksi Tata Bangunan; dan
 - 3) Seksi Bina Jasa Konstruksi.
- e. Bidang Tata Ruang terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
 - 2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.
- f. Bidang Pertanahan terdiri dari :
 - 1) Seksi Administrasi Pertanahan; dan
 - 2) Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum.
- g. UPT Dinas terdiri dari;
 - 1) UPT Peralatan; dan
 - 2) UPT Laboratorium Pengujian Material Konstruksi, dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dan sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan

Kabupaten Tanah Laut, bahwa tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai berikut :

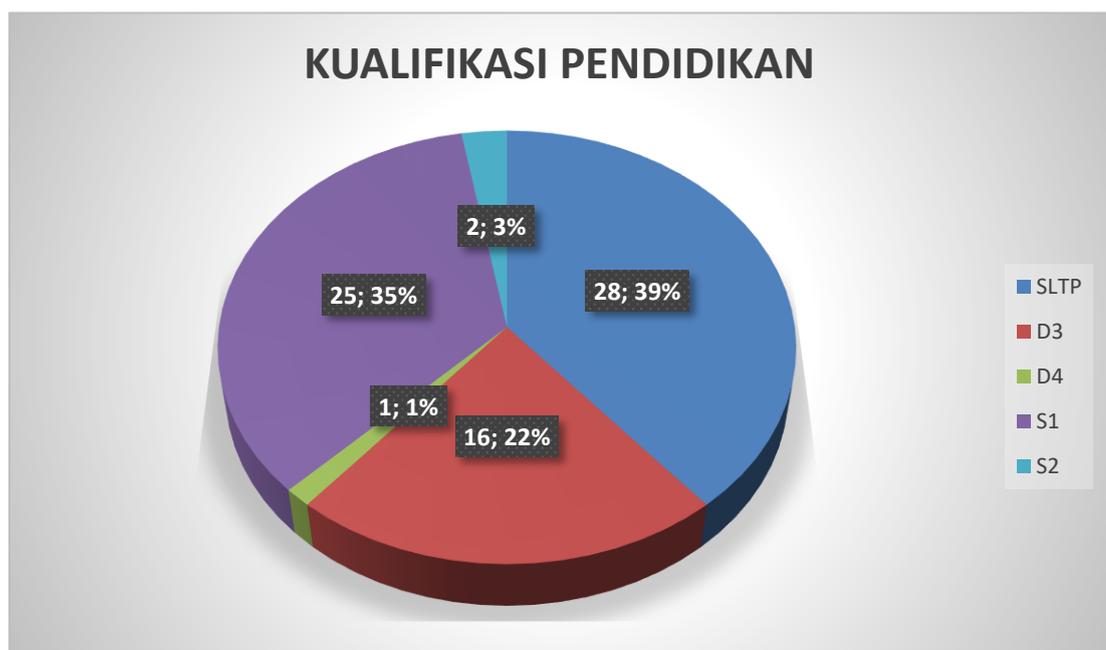
- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang bina marga;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang tata ruang;
- h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan;
- i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemberian perizinan, non perizinan / rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- j. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- k. membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

C. Kepegawaian

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Pada tahun 2019, pegawai Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 262 orang, yang terdiri dari 72 orang PNS dan 76 orang.

Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 72 orang yang jika dikelompokkan berdasarkan posisi tingkat pendidikan, golongan, dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Grafik 1.1
Kualifikasi Pendidikan

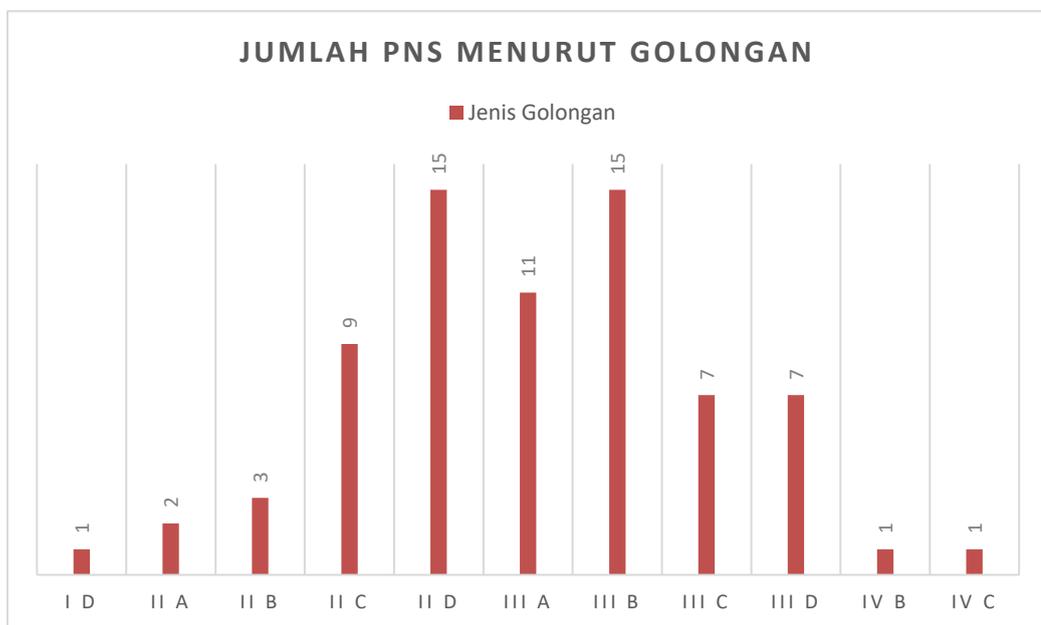


Dari diagram di atas dapat dikatakan bahwa 35 % pegawai sudah berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3 sebesar 22%. Diharapkan yang mereka yang berpendidikan D3 dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu dengan memberi kesempatan kepada mereka melalui ijin belajar maupun tugas belajar. Begitu juga yang berpendidikan dibawah D3 memungkinkan kepada mereka untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh

pemerintah daerah.

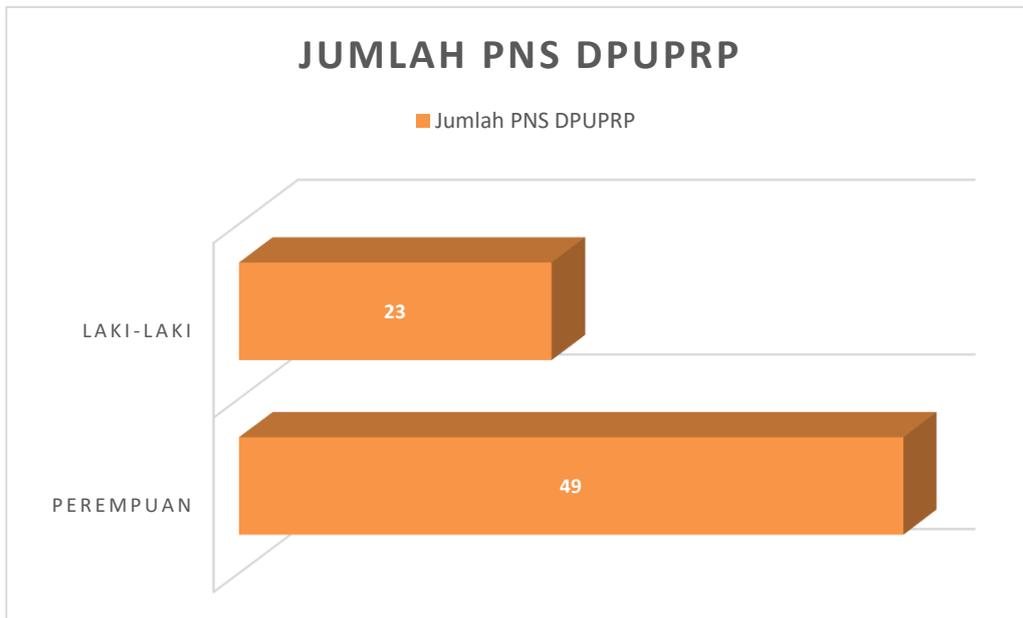
Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan jenis pendidikan sebanyak 33% merupakan lulusan teknik dan 67% lulusan non teknik yang mana semuanya mampu berkinerja dengan baik di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan. Namun Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan masih memerlukan pegawai yang pendidikan tingginya merupakan jurusan teknik.

Grafik 1.2
Jumlah PNS Menurut Golongan



Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan golongan seperti terlihat tabel di atas adalah 56% merupakan golongan III dan 3% merupakan IV dan sisanya 41% merupakan golongan I dan II dari total 72 orang Pegawai Negeri Sipil.

Grafik 1.3
Jumlah PNS DPUPRP



Berdasarkan diagram di atas dapat terlihat bahwa lebih dari 68% pegawai negeri sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut lebih banyak berjenis perempuan dibandingkan dengan jenis kelamin laki – laki sebesar 32% dari total pegawai negeri sipil.

D. Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan capaian kinerja selama kurun waktu 2014-2018 serta proyeksi selama lima tahun mendatang kurun waktu 2019-2023, dapat digambarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang mendesak dan harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pengelolaan barang belum optimal
- Masih kurangnya pengelola kegiatan dan Administrasi yang bersertifikat
- Belum Optimalnya data dan Informasi yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat
- Belum seluruh jalan dan Jembatan dalam kondisi baik sesuai kapasitas jalan dan jembatan kabupaten

- Terdapat defisit imbalan air pada sebagian Daerah Irigasi (DI)
- Belum optimalnya penyediaan dan pengolahan air baku
- Ruang lingkup Penanganan yang kompleks
- Belum maksimalnya koordinasi lintas SKPD terkait bidang SDA
- Berkurangnya areal pertanian/tanaman pangan
- Kurangnya infrastruktur air baku
- Belum sinkronnya mapping antar sektor (one map)
- Masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan akses terhadap air minum yang layak
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan air limbah
- Belum adanya sarana dan prasarana
- Belum sepenuhnya RTRW menjadi acuan Program Pembangunan dan panduan masyarakat dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
- Masih adanya permasalahan dan konflik kepemilikan dan hak atas tanah
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat khususnya terkait alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lainnya

Di samping permasalahan tersebut di atas, terdapat juga permasalahan pelayanan SKPD dalam pemenuhan SPM di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga teknis;
2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum;
3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan dan menambah kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur khususnya tenaga teknis;
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya fasilitas umum;
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait

4. Meningkatkan kemantapan jalan kabupaten;
5. Meningkatkan ketersediaan air irigasi;
6. Meningkatkan cakupan layanan air minum permukiman;
7. Meningkatkan cakupan layanan sistem air limbah permukiman;
8. Meningkatkan ketersediaan informasi penataan ruang;
9. Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
10. Meningkatkan implementasi SPIP;
11. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi.

E. Produk dan Layanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dan untuk melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
4. pelaksanaan administrasi dinas;
5. pembinaan UPT Dinas; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Maka sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut produk dan layanan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing bidang.

Pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi :

1. Pembangunan ruang kelas, pagar sekolah, paving blok halaman dan parkir sekolah.
2. Pembangunan ruang kantor dan sarana pendukungnya, gedung serbaguna, pesantren dan gedung olah raga.
3. Pembuatan drainase.
4. Pembuatan sumur bor.
5. Pemasangan jaringan perpipaan.
6. Perluasan sambungan rumah.
7. Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal .
8. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM .
9. Pendampng PANSIMAS.

Pada Bidang Bina Marga :

1. Rehab jalan dan jembatan.
2. Pembangunan Box Culvert.
3. Peningkatan Jalan.
4. Pelebaran jembatan.
5. Pembangunan jembatan Box Culvert.

Pada Bidang Sumber Daya Air :

1. Rehab embung, rehab tanggul, peningkatan jembatan penyeberangan pertanian.
2. Pembangunan pintu air.
3. Pembangunan jembatan pertanian.
4. Pembangunan siring sungai, bendungan dan embung.
5. Pembangunan talud irigasi.
6. Pembuatan embung dan siring sungai.
7. Pembuatan pembangunan pengaman pantai.
8. Normalisasi sungai.

Pada Bidang Tata Ruang :

1. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bati-Bati.
2. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pelaihari.

3. Dokumen terkait pengendalian dan arahan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

Pada Bidang Pertanahan :

1. Dokumen usulan terkait pemanfaatan lahan.
2. Dokumen terkait jumlah area / lahan yang dapat diinventarisasi / diidentifikasi tanah pemerintah daerah dan fasilitas umum.
3. Melaksanakan fasilitasi terhadap konflik – konflik pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut memiliki 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis, yaitu UPT Peralatan dan UPT Laboratorium.

Berdasarkan peraturan bupati tersebut UPT Peralatan dan dan UPT Laboratorium mempunyai tugas :

UPT Peralatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peralatan meliputi perawatan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan.

Berdasarkan tugas tersebut UPT Peralatan mempunyai layanan penyewaan alat – alat berat yang bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga, yang mana dari penyewaan alat – alat berat ini mampu memberikan PAD bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut

UPT Laboratorium Pengujian Material Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengujian material konstruksi dan pengembangan teknologi untuk mendukung capaian kualitas hasil pembangunan/perbaikan konstruksi serta pelayanan informasi konstruksi.

Berdasarkan tugas tersebut UPT Laboratorium Pengujian Material Konstruksi mempunyai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah, untuk melakukan uji material terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, yang mana ini juga mampu memberikan PAD bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

F. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan lakip, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kepegawaian, isu strategis, produk dan layanan dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan visi RPJMD, misi RPJMD, Tujuan sesuai renstra, sasaran strategis, tabel (tujuan, indikator, target selama 5 tahun), indikator kinerja utama, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian indikator kinerja utama yang berisi uraian tabel target dan capaian IKU dan Uraian dan analisis capaian IKU, capaian sasaran strategis berisi capaian strategis eselon II, eselon II dan eselon IV, tabel realisasi capaian sasaran strategis dan uraian dan analisa capaian strategis dan akuntabilitas keuangan berisi ringkasan realisasi APBD Tahun 2019.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan dan strategi peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada periode 2018–2023 adalah: “Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI”.

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk ada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

- INOVASI** : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.
- TERTATA** : Secara umum, makna “tertata” adalah tertib administrasi dan tertib substansi. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.
- RELIGIUS** : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

- AKTUAL** : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- SINERGI** : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotongroyongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”**. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah **“KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS”**.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang **BERINTERAKSI** pada lokus **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”** melalui **“KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS”**. Fokus pada lokus **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”** adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

B. Misi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “Tanah Laut yang BERINTERAKSI”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

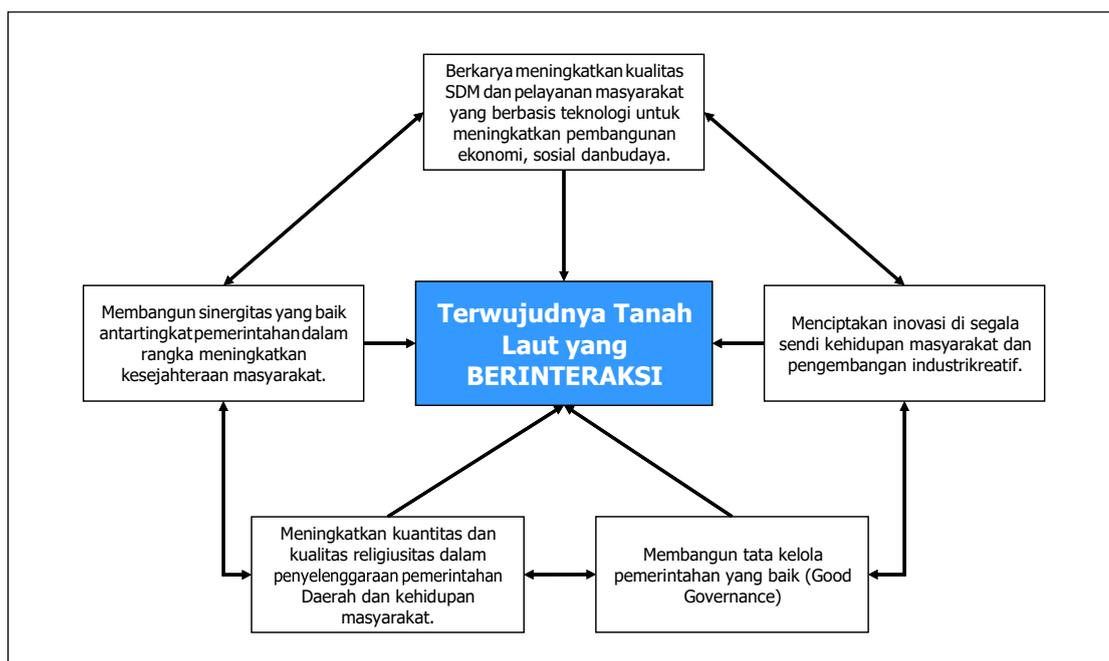
Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.

Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara grafis, hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.1
Hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023



Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

VISI :	Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	
Pokok-Pokok Visi	MISI	
BERKARYA	1.	Berkarya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial da budaya.
INOVASI	2.	Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
TERTATA	3.	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).
RELIGIUS	4.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
AKTUAL SINERGI	5.	Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Tanah Laut untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

C.1. Tujuan dan Sasaran Misi Pertama

Dalam Misi 1 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu “Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya”, maka ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 6 (enam) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

- Tujuan 1 : Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat
- Sasaran 1.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan
- Sasaran 1.2 : Meningkatnya kompetensi pencari kerja yang ditempatkan melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi
- Tujuan 2 : Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat
- Sasaran 2.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan

Tujuan 3 : Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya

Sasaran 3.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya

Sasaran 3.2 : Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga

Sasaran 3.3 : Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi

Tabel 2.2
Keterkaitan Misi Kesatu dengan Tujuan dan Sasaran

MISI 1	Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.			
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Peningkatan layanan bidang pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (tahun) Harapan lama sekolah (tahun)
			Meningkatnya kompetensi pencari kerja yang ditempatkan melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Siap Kerja (Program Unggulan #4)
	Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan Angka	Angka Harapan Hidup

	terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
				Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan On Call (Program Unggulan #5)
	Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung ekonomi, sosial dan budaya	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (%)
				Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil (%) 100
				Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (%)
			Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga Cakupan	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)
				Indeks Pembangunan Pemuda
				Jumlah Atlet yang berprestasi
			Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%) 100

C.2. Tujuan dan Sasaran Misi Kedua

Dalam kerangka mewujudkan Misi 2 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu: “Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif”, maka ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu :

Tujuan 1 : Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik

Sasaran 1.1 : Meningkatnya inovasi pelayanan publik

Tujuan 2 : Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif

Sasaran 2.1 : Meningkatnya Penerapan teknologiKontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian

Tabel 2.3
Keterkaitan Misi Kedua dengan Tujuan dan Sasaran

MISI 2 Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif				
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Jumlah penghargaan inovasi publik	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan
	Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di Masyarakat	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang (unit)
			Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)

C.3. Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga

Dalam kerangka mewujudkan Misi 3 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu: “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Sasaran 1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik

Sasaran 1.2 : Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik

Tabel 2.4
Keterkaitan Misi Ketiga dengan Tujuan dan Sasaran

MISI 3				
Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)				
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)
				Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)
			Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks keterbukaan informasi publik
				Persentase SKPD/OPD yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi
			Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD)

			aparatur Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur	
--	--	--	--	--

C.4. Tujuan dan Sasaran Misi Keempat

Dalam kerangka mewujudkan Misi 4 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu: “Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat”, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitu :

- Tujuan 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia
 Sasaran 1.1 : Meningkatkan toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama
 Sasaran 1.2 : Meningkatkan wawasan kebangsaan
 Sasaran 1.3 : Meningkatkan aksi sosial keagamaan

Tabel 2.5
Keterkaitan Misi Keempat dengan Tujuan dan Sasaran

Misi 4	Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat			
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)
			Meningkatnya wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial (kasus)
			Meningkatnya aksi sosial keagamaan	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)

C.5. Tujuan dan Sasaran Misi Kelima

Dalam kerangka mewujudkan Misi 5 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu: “Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, maka ditetapkan 5 (lima) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran pembangunan daerah, yaitu :

- Tujuan 1 : Meningkatkan kesejahteraan sosial
- Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas Pertumbuhan Ekonomi
- Sasaran 1.2 : Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah
- Sasaran 1.3 : Menurunnya tingkat pengangguran
- Sasaran 1.4 : Meningkatnya perlindungan masyarakat
- Tujuan 2 : Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas
- Sasaran 2.1 : Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas

Tabel 2.6
Keterkaitan Misi Kelima dengan Tujuan dan Sasaran

MISI 5	Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan (%)	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi
				Indeks Gini (skor)
				PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)
			Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (skor)
			Menurunnya	Tingkat Pengangguran Terbuka

			tingkat pengangguran	(%)
			Meningkatnya perlindungan masyarakat	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)
				Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)
				Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)
	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangu n Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (Program Unggulan #6) (%)
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)
	Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah	Persentase Pertumbuhan sector unggulan daerah	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Jumlah pelaku usaha dan kelompok tani/ nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0% (program unggulan #1)
				Pertumbuhan sektor Pertanian
				Pertumbuhan sektor Industri olahan
				Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)
			Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH Ketersediaan (nilai)
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)
	Peningkatan	Indeks Desa	Meningkatnya	Cakupan desa yang tata kelola

	Upaya Membina Desa dan Menata Kota Indeks	Membangun (skor)	Pembinaan Desa	pemerintahannya baik (%)
				Cakupan Kinerja Pengelolaan ADD untuk Desa Membangun ((Program Unggulan #2) (%)
				Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat (Program Unggulan #7) (desa)
				Jumlah Desa di bina berciri khas
			Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)
				Persentase Penataan Pasar Pelaihari (%)

Berdasarkan tujuan dan sasaran diatas, bahwa yang menjadi tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik dengan sasaran Meningkatnya inovasi pelayanan publik
2. Tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik
3. Tujuan Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas dengan sasaran Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas
4. Tujuan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 2.7
Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik dengan sasaran Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Jumlah penghargaan inovasi publik	Meningkatnya inovasi pelayanan publik
2.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas PUPRP
3.	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (Program Unggulan #6) (%)
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)
4.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)

D. Tabel (Tujuan, Indikator, Target, sasaran, Indikator, Target 5 Tahun)

Tabel 2.8
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik dengan sasaran Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Jumlah penghargaan inovasi publik	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	70	75	75	75	75
2.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah	BB	BB	A	A	A
3.	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (Program Unggulan #6) (%)	38	43	64	80	85
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	84	87	93	97	100
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	65	70	73	78	80
4.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	70	78	87	92	98

E. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab/ Sumber Data	
1	Meningkatkan Infrastruktur Ke PU an	1	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik $\frac{\text{Panjang sungai dalam kondisi baik}}{\text{Panjang sungai Kabupaten}} \times 100 \%$	Bidang Sumber Daya Air	
		2	Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik $\frac{\text{Jaringan Irigasi yang berfungsi baik}}{\text{Luas Irigasi}} \times 100 \%$		
		3	Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	Jumlah jembatan dalam Kondisi baik	Bidang Bina Marga
		4	Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	Panjang Jalan dalam kondisi baik	
		5	Persentase Penyediaan Prasarana Air baku $\frac{\text{Total kapasitas Ikk lt/Det TALA}}{\text{Jumlah Penduduk TALA}} \times 100 \%$		Bidang Cipata Karya dan Jasa Kontruksi
2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	1	Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	Luas Sawah Yang Dapat dialiri jaringan irigasi	Bidang Sumber Daya Air
		2	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air $\frac{\text{Luas Kawasan Sungai dan Pesisir Pantai yang telah dilindungi}}{\text{Target Luas Kawasan Sungai dan Pesisir pantai yang akan dilindungi}} \times 100 \%$		
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	1	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman $\frac{\text{Total RT yang Terlayani}}{\text{Jumlah Total RT Kab. TALA}} \times 100 \%$	Bidang Cipata Karya dan Jasa Kontruksi	
		2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak $\frac{\text{Total RT dengan sanitasi layak}}{\text{Jumlah Total RT Kab. TALA}} \times 100 \%$		
4	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	1	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW $\frac{\text{Hasil evaluasi (audit) perwujudan struktur ruang}}{2} \times 100\%$	Bidang tata ruang	
5	Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	1	Persentase teridentifikasinya tanah negara $\frac{\text{Jumlah tanah negara yang teridentifikasi}}{\text{Jumlah luas tanah negara}} \times 100\%$	Bidang Pertanahan	

6	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut	2	Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah	$\frac{\text{Jumlah konflik/sengketa tanah pemerintah yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah konflik/sengketa tanah pemerintah yang terdata}} \times 100 \%$	
---	---	---	---	---	--

Indikator Kinerja Utama Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 2.10
Indikator Kinerja Utama Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pertanahan	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretariat
2	Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	
3	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	
4	Pelayanan Administrasi keuangan	Jumlah dokumen keuangan	
5	Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang (%)	Bidang Bina Marga
6	Meningkatnya jembatan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Kenaikan Panjang Jembatan Kabupaten Kondisi Baik dan sedang	
7	Meningkatnya akses air minum bagi masyarakat	Persentase kenaikan rumah tangga yang mendapat akses air minum yang aman atau Tambahan jumlah sambungan rumah yang dapat dicapai kab/kota (SR)	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

8	Meningkatnya akses sanitasi bagi masyarakat	Jumlah tambahan cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai (%) atau jumlah tambahan akses pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai (SR)	
9	Meningkatkan dan mengoptimisasi infrastruktur jaringan irigasi	Persentase luas baku sawah yang terlayani irigasi	Bidang Sumber Daya Air
10	Meningkatkan infrastruktur pendayagunaan sumber daya air	persentase ketersediaan air baku	
11	Meningkatkan dan melakukan pemeliharaan saluran sungai	persentase panjang sungai dalam kondisi baik	
12	Meningkatkan upaya pengendalian daya rusak air	Persentase panjang garis pantai dalam kondisi baik	
	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase dokumen perencanaan	Bidang Tata Ruang
		Persentase pertimbangan teknis tata ruang	
		Persentase pengawasan tata ruang	
13	Meningkatnya Pemanfaatan Tanah Negara oleh Masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	Nilai kumulatif penyelenggaraan penataan pertanahan kabupaten	Bidang Pertanahan
14	Meningkatnya Penyelesaian Konflik/Sengketa tanah di kabupaten tanah laut	Jumlah lahan / area tanah yang difasilitasi penyelesaian sengketa tanah	
15	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT Laboratorium	Indeks Kepuasan pengguna jasa Uji	Sub Bagian TU UPT Laboratorium
16	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT Peralatan	Persentase Indeks Kepuasan pengguna alat berat	Sub Bagian TU UPT Peralatan

Indikator Kinerja Utama Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Utama Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	Sub Bagian Perencanaan
2	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Pemenuhan peningkatan daya aparatur	
3	Menyusun administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Sub bagian Keuangan
4	Terlaksananya Peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan kabupaten	Jumlah panjang jalan yang akan ditingkatkan dan di bangun pada tahun berjalan	Seksi Peningkatan, Pemeliharaan & Pengawasan Jalan & Jembatan
5	Terlaksananya Pembangunan Jalan sesuai dengan standar Bina Marga	Jumlah pembangunan jembatan dan panjang jalan yang akan dibangun pada tahun berjalan	Seksi Pembangunan jalan dan Jembatan
6	Terlaksananya perencanaan pembangunan jalan dan jembatan yang akan di bangun	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan bidang bina marga	Seksi Perencanaan Bina Marga
7	Menyipakan Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Negara	Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Negara	Seksi Tata Bangunan
8	Menyiapkan Dokumen Pengawasan Bangunan Gedung Negara	Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan Gedung Negara	
9	Meningkatnya wilayah pelayanan air minum	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Bersih	Seksi Air Bersih dan Sanitasi
10	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi	Jumlah Kumulatif Rumah Tangga Yang memiliki akses sanitasi	
11	Meningkatnya drainase yang terbangun	Jumlah kawasan yang terlayani oleh saluran drainase perkotaan	
	Meningkatnya Kinerja dan Produktivitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Total Penyedia Barang atau Jasa Yang aktif	Seksi Bina Jasa Konstruksi
	Meningkatnya Sistem Informasi Pembinaan Jasa Kontruksi (SIPJAKI)	Jumlah Penyedia barang atau jasa yang terentry	
	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Midang Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga jkerja konstruksi yang tersertifikasi	

12	Melaksanakan perencanaan tata ruang yang sesuai peraturan per-UU-an	Jumlah persetujuan substansi dokumen perencanaan	Seksi Perencanaan Tata Ruang
		Jumlah realisasi penyebaran informasi tentang tata ruang	
		Jumlah Perda RTR dan peraturan Zonasi yang disahkan	
13	Melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang sesuai dengan RTRW	Jumlah layanan pertimbangan teknis tata ruang yang sesuai dengan RTRW	Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
		Jumlah dokumen berita acara tinjau lapangan	
		Jumlah pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang	
14	Melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan	Jumlah dokumen pelayanan administrasi pertanahan untuk penataan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk tertib administrasi pertanahan	Seksi Administrasi Pertanahan
15	Memfasilitasi konflik-konflik pertanahan	Jumlah fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	
16	Melaksanakan inventarisasi aset pemerintah daerah dan fasilitas umum	Jumlah area / lahan yang dapat diinventarisasi/diidentifikasi tanah pemerintah daerah dan fasilitas umum	Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah
17	Melaksanakan penamaan rupa bumi/toponimi unsur pemerintah daerah	Jumlah dokumen terkait toponimi/penamaan rupa bumi	
18	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT Laboratorium	Indeks Kepuasan pengguna jasa Uji	Sub Bagian TU UPT Laboratorium
19	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT Peralatan	Persentase Indeks Kepuasan pengguna alat berat	Sub Bagian TU UPT Peralatan

E. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019

Pada tahun anggaran 2019 program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu berjumlah 22 program dengan 49 kegiatan yang terbagi kedalam 5 bidang dan 1 sekretariat. Sedangkan program dan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 4 program dengan 20 kegiatan, yang terbagi kedalam 2 UPT yaitu UPT Laboratorium berjumlah 3 program dengan 11 kegiatan, dan UPT Peralatan berjumlah 1 program dengan 9 kegiatan.

Program dan kegiatan yang ada pada masing – masing bidang, sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9
Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat
1	Kegiatan penyediaan jasa omunikasi, sumber daya air dan listrik	
2	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	
3	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	
4	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	
5	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	
6	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
7	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
8	Kegiatan penyediaan peralatan dan perelengkapan kantor	
9	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	
10	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	
11	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	
12	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	
13	Kegiatan penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bidang Bina Marga
14	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	
15	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bidang Bina Marga
16	Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bidang Bina Marga
17	Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bidang Bina Marga
18	Kegiatan perncanaan pembangunan jalan	
19	Kegiatan pembangunan jalan	

	20	Kegiatan perencanaan pembangunan jembatan	
	21	Kegiatan pembangunan jembatan	
6	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		Bidang Sumber Daya Air
	22	Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Sekretariat
	23	Kegiatan penyusunan rencana pembinaan karir PNS	
8	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		Bidang Pertanahan
	24	Kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		Sekretariat
	25	Kegiatan penyusunan tabulasi data aset tetap	
10	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Bidang Bina Marga
	26	Kegiatan perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	
	27	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	
11	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong		Bidang Sumber Daya Air
	28	Kegiatan perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	
12	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Sekretariat
	29	Kegiatan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	
13	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		Bidang Sumber Daya Air
	30	Kegiatan perencanaan pembanguna jaringan irigasi	
	31	Kegiatan pembangunan pintu air	
	32	Kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai	
	33	Kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	
	34	Kegiatan pemberdayaan petani pemakai air	
14	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya		Bidang Sumber Daya Air
	35	Kegiatan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
	36	Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	
	37	Kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan sanitasi (pendamping PANSIMAS)	
	38	Kegiatan prasarana dan sarana air limbah (DAK Reguler)	
	39	Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi	

		masyarakat berpenghasilan rendah (DAK PENUGASAN)	
	40	Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK Reguler)	
16		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	
	41	Kegiatan pendamping PNPM mandiri perkotaan (P2KP)	
17		Program Keciptakarya	
	42	Kegiatan pembangunan gedung kantor	
18		Program Perencanaan Tata Ruang	
	43	Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Bidang Tata Ruang
	44	Kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	
	45	Kegiatan rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	
19		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	
	46	Kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	
20		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	
	47	Kegiatan toponimi/penamaan rupa unsur administrasi pemerintahan	Bidang Pertanahan
21		Program Penataan Tata Guna Tanah	
	48	Kegiatan inventarisasi tanah pemerintah daerah dan fasilitas umum	
22		Program Pengaturan Jasa Kontruksi	
	49	Kegiatan pembinaan badan usaha jasa konstruksi	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

Tabel 2.10
Program dan Kegiatan UPT Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		UPT Laboratorium
	1	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	
	2	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	
	3	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	
	4	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
	5	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
	6	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
	7	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
	8	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	9	Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
3	Program Pengembangan Teknologi Knstruksi		
	10	Kegiatan identifikasi dan informasi teknik konstruksi	
	11	Kegiatan optimalisasi laboratorium pengujian	
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		UPT Peralatan
	12	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
	13	Kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	
	14	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	
	15	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	
	16	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	
	17	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
	18	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
	19	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	

	20	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
	21	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	

F. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Eselon 2 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja Eselon 2 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	Peningkatan infrastruktur ke-PU-an	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89,00%	Bidang Sumber Daya Air
		Persentase jaringan irigasi berfungsi baik	84,00%	
		Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	25 Unit	Bidang Bina Marga
		Persentase Penyediaan Prasarana Air baku	19,00%	
2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	14.401,84 Ha	Bidang Sumber Daya Air
		Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	94,2 %	
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman	36.06 %	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
		Persentase RT yang memiliki sanitasi yang layak	51.65 %	
4	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian tata ruang	100 %	Bidang Tata Ruang
5	Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh	Persentase teridentifikasinya tanah	10 Lokasi	Bidang Pertanahan

	masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	negara		
6	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah	3 Kasus	

Perjanjian Kinerja Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 2.12
Perjanjian Kinerja Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pertanahan	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70	Sekretariat
2	Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	
3	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	7 Dok	
4	Pelayanan Administrasi keuangan	Jumlah dokumen keuangan	17 Dokumen	
5	Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang (%)	5%	Bidang Bina Marga
6	Meningkatnya jembatan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Kenaikan Panjang Jembatan Kabupaten Kondisi Baik dan sedang	16 Unit	

7	Meningkatnya akses air minum bagi masyarakat	Persentase kenaikan rumah tangga yang mendapat akses air minum yang aman atau Tambahan jumlah sambungan rumah yang dapat dicapai kab/kota (SR)	1252 SR	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
8	Meningkatnya akses sanitasi bagi masyarakat	Jumlah tambahan cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai (%) atau jumlah tambahan akses pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai (SR)	1300 SR	
9	Meningkatkan dan mengoptimalkan infrastruktur jaringan irigasi	Persentase luas baku sawah yang terlayani irigasi	68,8%	Bidang Sumber Daya Air
10	Meningkatkan infrastruktur pendayagunaan sumber daya air	persentase ketersediaan air baku	50%	
11	Meningkatkan dan melakukan pemeliharaan saluran sungai	persentase panjang sungai dalam kondisi baik	22,3%	
12	Meningkatkan upaya pengendalian daya rusak air	Persentase panjang garis pantai dalam kondisi baik	5,2%	
	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase dokumen perencanaan	100%	Bidang Tata Ruang
		Persentase pertimbangan teknis tata ruang	100%	
		Persentase pengawasan tata ruang	100%	
13	Meningkatnya Pemanfaatan Tanah Negara oleh Masyarakat, swasta dan pemerintah	Nilai kumulatif penyelenggaraan penataan pertanahan kabupaten	10 IPPT dan 4 Rekome	Bidang Pertanahan

	daerah untuk pembangunan		ndasi redistribusi tanah	
14	Meningkatnya Penyelesaian Konflik/Sengketa tanah di kabupaten tanah laut	Jumlah lahan / area tanah yang difasilitasi penyelesaian sengketa tanah	3 konflik/sengketa tanah	
15	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT Laboratorium	Indeks Kepuasan pengguna jasa Uji	75%	Sub Bagian TU UPT Laboratorium
16	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT Peralatan	Persentase Indeks Kepuasan pengguna alat berat	70%	Sub Bagian TU UPT Peralatan

Perjanjian Kinerja Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.13
Perjanjian Kinerja Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	7 Dokumen	Sub Bagian Perencanaan
2	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran	1 Tahun	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Pemenuhan peningkatan daya aparatur	1 Tahun	
3	Menyusun administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	17 Dokumen	Sub bagian Keuangan
4	Terlaksananya Peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan kabupaten	Jumlah panjang jalan yang akan ditingkatkan dan dibangun pada tahun berjalan	64,927 Km	Seksi Peningkatan, Pemeliharaan & Pengawasan

				Jalan & Jembatan
5	Terlaksananya Pembangunan Jalan sesuai dengan standar Bina Marga	Jumlah pembangunan jembatan dan panjang jalan yang akan dibangun pada tahun berjalan	16 Unit dan 21,215 Km	Seksi Pembangunan jalan dan Jembatan
6	Terlaksananya perencanaan pembangunan jalan dan jembatan yang akan di bangun	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan bidang bina marga	17 Dokumen	Seksi Perencanaan Bina Marga
7	Menyipakan Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Negara	Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Negara	18 Dokumen	Seksi Tata Bangunan
8	Menyiapkan Dokumen Pengawasan Bangunan Gedung Negara	Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan Gedung Negara	24 Bangunan	
9	Meningkatnya wilayah pelayanan air minum	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Bersih	1252 SR	Seksi Air Bersih dan Sanitasi
10	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi	Jumlah Komulatif Rumah Tangga Yang memiliki akses sanitasi	1300 Jiwa	
11	Meningkatnya drainase yang terbangun	Jumlah kawasan yang terlayani oleh saluran drainase perkotaan	7550 M	
	Meningkatnya Kinerja dan Produktivitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Total Penyedia Barang atau Jasa Yang aktif	421 Badan Usaha	Seksi Bina Jasa Konstruksi
	Meningkatnya Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah Penyedia barang atau jasa yang terentry	100 Badan Usaha	
	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Midang Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga jkerja konstruksi yang tersertifikasi	150 Orang	
12	Melaksanakan perencanaan tata ruang yang sesuai peraturan per-UU-an	Jumlah persetujuan substansi dokumen perencanaan	63%	Seksi Perencanaan Tata Ruang
		Jumlah realisasi penyebaran informasi tentang tata ruang	33%	
		Jumlah Perda RTR dan peraturan Zonasi yang disahkan	33%	
13	Melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang sesuai dengan RTRW	Jumlah layanan pertimbangan teknis tata ruang yang sesuai dengan	100%	Seksi Pemanfaatan Tata Ruang

		RTRW		
		Jumlah dokumen berita acara tinjau lapangan	100%	
		Jumlah pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang	100%	
14	Melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan	Jumlah dokumen pelayanan administrasi pertanahan untuk penataan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk tertib administrasi pertanahan	10 Dokumen	Seksi Administrasi Pertanahan
15	Memfasilitasi konflik-konflik pertanahan	Jumlah fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	3 konflik/sengketa tanah	
16	Melaksanakan inventarisasi aset pemerintah daerah dan fasilitas umum	Jumlah area / lahan yang dapat diinventarisasi/diidentifikasi tanah pemerintah daerah dan fasilitas umum	10 Dokumen Inventarisasi	Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah
17	Melaksanakan penamaan rupa bumi/toponimi unsur pemerintah daerah	Jumlah dokumen terkait toponimi/penamaan rupa bumi	1 Dokumen	
18	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT Laboratorium	Indeks Kepuasan pengguna jasa Uji	75%	Sub Bagian TU UPT Laboratorium
19	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT Peralatan	Persentase Indeks Kepuasan pengguna alat berat	70%	Sub Bagian TU UPT Peralatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut merupakan LAKIP sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dalam penyusunannya ini masih banyak dijumpai berbagai hambatan, antara lain pengumpulan data kinerja yang tersebar pada berbagai bidang dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Namun demikian, beberapa kegiatan kunci yang mempunyai nilai strategis tinggi telah dapat diukur kinerjanya, sehingga secara umum ketidakadaan informasi kinerja pada beberapa kegiatan tidak mempengaruhi capaian kinerja organisasi secara umum.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Metode seperti ini sangat bermanfaat dalam upaya memberikan gambaran kepada pihak lain tentang pelaksanaan upaya organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019. Yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 195 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Perangkat Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 6 Kinerja Utama dengan 12 Indikator Kinerja.

LAPORAN KINERJA 2019

1. Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab/ Sumber Data	
1	Meningkatkan Infrastruktur Ke PU an	1	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik $\frac{\text{Panjang sungai dalam kondisi baik}}{\text{Panjang sungai Kabupaten}} \times 100 \%$	Bidang Sumber Daya Air	
		2	Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik $\frac{\text{Jaringan Irigasi yang berfungsi baik}}{\text{Luas Irigasi}} \times 100 \%$		
		3	Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	Jumlah jembatan dalam Kondisi baik	Bidang Bina Marga
		4	Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	Panjang Jalan dalam kondisi baik	
		5	Persentase Penyediaan Prasarana Air baku $\frac{\text{Total kapasitas Ikk It/Det TALA}}{\text{Jumlah Penduduk TALA}} \times 100 \%$	Bidang Cipata Karya dan Jasa Kontruksi	
2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	1	Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	Luas Sawah Yang Dapat dialiri jaringan irigasi	Bidang Sumber Daya Air
		2	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air $\frac{\text{Luas Kawasan Sungai dan Pesisir Pantai yang telah dilindungi}}{\text{Target Luas Kawasan Sungai dan Pesisir pantai yang akan dilindungi}} \times 100 \%$		
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	1	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman $\frac{\text{Total RT yang Terlayani}}{\text{Jumlah Total RT Kab. TALA}} \times 100 \%$	Bidang Cipata Karya dan Jasa Kontruksi	
		2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak $\frac{\text{Total RT dengan sanitasi layak}}{\text{Jumlah Total RT Kab. TALA}} \times 100 \%$		
4	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	1	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW $\frac{\text{Hasil evaluasi (audit) perwujudan struktur ruang}}{2} \times 100 \%$	Bidang tata ruang	

5	Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	1	Persentase teridentifikasinya tanah negara	$\frac{\text{Jumlah tanah negara yang teridentifikasi}}{\text{Jumlah luas tanah negara}} \times 100\%$	Bidang Pertanahan
6	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut	2	Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah	$\frac{\text{Jumlah konflik/sengketa tanah pemerintah yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah konflik/sengketa tanah pemerintah yang terdata}} \times 100\%$	

2. Target Indikator Kinerja

Sebagaimana yang telah dibuat perjanjian kinerja, maka target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019
1	Meningkat infrastruktur ke PU an	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89 %
		Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik	84 %
		Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	25 Unit
		Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	21,215 Km
		Persentase Penyediaan Prasarana Air baku	19 %
2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	14.401,84 Ha
		Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	94,2 %
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman	36,06 % / 1252 SR
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak	51,65 % /

			1300 Jiwa
4	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	100 %
5	Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	Persentase teridentifikasinya tanah negara	10 Lokasi
6	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah	3 Kasus

3. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka capaian IKU DPUPRP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Capaian %
1	Meningkat infrastruktur ke PU an	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89 %	100,5
		Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik	84 %	100
		Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	25 Unit	100
		Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	21,215 Km	127,28
		Persentase Penyediaan Prasarana Air baku	19 %	100
2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	14.401,84 Ha	99,8
		Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	94,2 %	93,52
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman	37,86 %	38,02 %
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak	51,65 %	51,65 %
4	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	100 %	100
5	Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	Persentase teridentifikasinya tanah negara	100%	40
6	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah	100%	33,33

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah didukung melalui :

- a) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

- b) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- c) Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- d) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.
- e) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong.
- f) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
- g) Program Perencanaan Tata Ruang.
- h) Program Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- i) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.

Uraian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran 1 : Meningkatnya infrastruktur ke PU an

Tahun 2019, untuk mencapai ini telah dilaksanakan melalui :

- 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan anggaran Rp. 17.234.577.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.900.191.150,- atau 81%.
- 2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan anggaran sebesar Rp. 32.192.612.086,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.147.733.652,- atau 96,75%
- 3) Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan anggaran sebesar Rp. 75.935.026.204 dan terealisasi sebesar Rp. 72.775.503.619,- atau 96%.
- 4) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 1.525.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 907.991.400,- atau 52,54%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 5 (lima) indicator sasaran yaitu :

- 1) Persentase panjang sungai dalam kondisi baik
- 2) Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik
- 3) Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)
- 4) Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)
- 5) Persentase Penyediaan Prasarana Air baku

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian per Indikator Sasaran 1

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkat infrastruktur ke PU an	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89 %	89,44%	100,5
		Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik	84 %	84%	100
		Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	25 Unit	25 Unit	100
		Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	21,215 Km	27,003 Km	127,28
		Persentase Penyediaan Prasarana Air baku	19 %	19%	100

Indikator 1 : Persentase panjang sungai dalam kondisi baik

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan saluran sungai dan tercapai 100,5% dengan kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai yaitu melakukan normalisasi Sungai Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung seluas 1.000 meter dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

Indikator 2 : Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan pemeliharaan jaringan irigasi dan pengadaan sarana mendukung kegiatan pertanian dan tercapai 84% meliputi pembangunan konstruksi Rehab Embung Desa Asam Jaya Kec. Jorong, Pengerukan Bendungan RT 01 dan RW 01 Desa Kait-Kait Kec. Bati-Bati, Rehab Tanggul Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati, Rehab Gorong-Gorong Beton Desa Muara Asam-Asam Kec. Jorong, Rehab Tanggul Pertanian Penahan Air Asin Desa Pantai Harapan Kec. Bumi Makmur, Rehab Jembatan Penyeberangan Petani Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan, Rehab Pintu Air Pumpung Desa Kunyit Kec. Bajuin, Peningkatan Jembatan Penyeberangan Desa Kait-Kait Kec. Bati-Bati dan Peningkatan Jembatan Penyeberangan Pertanian Desa Kintap Kecil Kec. Kintap dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

Indikator 3 : Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan dan Kegiatan Pembangunan Jembatan, dan tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan Jembatan terealisasi sebanyak 5 dokumen yang terdiri dari Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Pelaihari, Bajuin dan Batu Ampar Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Takisung, dan Panyipatan Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Tambang Ulang, dan Bati-Bati Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Kurau, dan Bumi Makmur Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Jorong, dan Kintap Tahun 2020 dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.
- 2) Kegiatan yang mendukung Pembangunan Jembatan yaitu Rehab Jembatan Desa Bajuin Kec. Bajuin, Pembangunan Box Culvert Desa Jilatan Alur Kec. Jorong, Pembangunan Box Culvert Desa Handil Maluka Kec. Bumi Makmur, Pembangunan Box Culvert Desa Asri Mulya Kec. Jorong, Pembangunan Box Culvert Desa Kurau Kec. Kurau, Pembangunan Box Culvert Desa Suka Ramah Rt 14 Kec. Panyipatan, Pembangunan Box Culvert Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari, Pembangunan Box Culvert Desa Telaga Langsung Kec. Takisung, Pembangunan Box Culvert Desa Martadah RT. 4 Kec. Tambang Ulang, Pembangunan Box Culvert Transos Sungai Riam Kec. Pelaihari, Pembangunan Jembatan Desa Swarangan, Pembangunan Jembatan Desa Sumber Makmur, Pembangunan Jembatan Desa Sungai Bakau, Pembangunan Box Culvert Desa Kurau Jl. Kencana Kec. Kurau, Pembangunan Box Culvert Jl. Arah Pantai Turki Swarangan Kec. Jorong, Pembangunan Siring Pengaman Jembatan Desa Sabuhur (Pt. Golden), Pembangunan Box Culvert Desa Sumber Makmur Kec. Batu Ampar, Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Sungai Riam - Banua Tengah Kec. Pelaihari, Pelebaran Jembatan Ujung Batu Kec. Pelaihari, Rehabilitasi Box Crossing Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang, Pembangunan Jembatan Box Culvert Jl. Pertanian (Jl. JBG) Desa Swarangan Kec. Jorong, Pembangunan Jembatan Box Culvert Desa Bluru RT. 1 Kec. Batu Ampar,

Pembangunan Jembatan Box Culvert Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari (Uk. 3 x 6 m) dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

Indikator 4 : Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan, Pembangunan Jalan, Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK), Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Penugasan) dan tercapai 100%, dengan 6 kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan sebanyak 7 Dokumen yaitu, Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jalan Kec. Pelaihari, Bajuin dan Batu Ampar Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Takisung, dan Panyipatan Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Tambang Ulang, dan Bati-Bati Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Kurau, dan Bumi Makmur Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Jorong, dan Kintap Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jalan Ke Pelabuhan, Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jalan ke Rumah Sakit di Kel. Sarang Halang dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.
- 2) Kegiatan yang mendukung Pembangunan Jalan yaitu Perkerasan Jalan di Desa Tanjung Rt. 04 menuju Desa Tebing Siring Kec. Bajuin, Peningkatan Jalan Sambangan Menuju Makam Keramat Kec. Bati-Bati, Peningkatan Jalan Desa Bluru Kec. Batu Ampar, Perkerasan Jalan Desa Jilatan RT.6 Kec. Batu Ampar, Peningkatan Jalan Desa Jilatan Alur Kec. Jorong, Peningkatan Jalan Desa Handil Labuan Amas Rt. 04 dan Rt. 05 Desa Handil Labuan Amas Kec. Bumi Makmur, Perkerasan Jalan Desa Alur Sabuhur Kec. Jorong, Peningkatan Jalan Desa Sungai Cuka Kec. Kintap, Peningkatan Jalan Dusun 1 dan 2 Desa Kebun Raya Kec. Kintap, Perkerasan Jalan Desa Kintap Kecil Rt. 03, 06, 08 Kec. Kintap, Peningkatan Jalan Masuk SMA, SMP, MTS N 1 Kurau Kec. Kurau, Perkerasan Jalan di Rt. 16 Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan, Peningkatan Jalan Lingkungan Rt. 13 Desa Sungai Riam / Transos Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Rt. 3 Desa Kampung Baru Jalan

Makam Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Rt. 1, 10, 4 Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Desa Gunung Makmur Kec. Takisung, Peningkatan Jalan Desa Sumber Makmur Kec. Takisung, TMMD Tahun 2019 Lokasi Martadah Baru Kec. Tambang Ulang, Peningkatan Jalan Desa sambangan jalan lentra kampung baru Kec. Bati-Bati, Peningkatan Jalan Alhikmah Kel. Angsau Pelaihari, Peningkatan Jalan gang rambut kel angsau Pelaihari, Peningkatan Jalan kamaratih tembus pemuda dan Jalan Nusa Indah Gg. Khalid Ds. Panggung kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Bakti 2 RT.3 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Kepembantuan RT.5 Desa Telaga, Peningkatan Jalan Desa Tampang RT.4 Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Desa Tajau Mulia Kec. Batu Ampar , Peningkatan jalan Desa Pemalongan Kec. Bajuin, Peningkatan Jalan Menuju Rumah Sakit Sarang Halang Kec. Pelaihari, Pembangunan Jalan Kunyit - Angsau Kec. Pelaihari, Perkerasan Jalan Kijang Mas - Jalan Tirta Jaya Kec. Pelaihari, Perkerasan Jalan Pertanian (Jl. JBG) Desa Swarangan Kec. Jorong, Perkerasan Jalan Amparaya RT.8 RW.4 Balicak Subur Desa Kandangan Lama Kec. Panyipatan, Perkerasan Jalan Desa Arsi Mulya Kec. Jorong, Perkerasan Jalan Gunung Tembaga RT. 4 Desa Tampang Kec. Pelaihari, Perkerasan Jalan Kutai Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Pembantuan RT. 5 - RT.10 Desa Telaga Kec. Pelaihari dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

- 3) Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang meliputi jasa konsultan perencanaan sebanyak 7 Dokumen yang terdiri dari Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Pelaihari, Bajuin dan Batu Ampar Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Takisung, dan Panyipatan Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Tambang Ulang, dan Bati-Bati Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Kurau, dan Bumi Makmur Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Jorong, dan Kintap Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Jalan Rombongan Lima - Ranggung (Ruas No.5), Konsultansi Perencanaan Jalan Mekar Sari Trans Blok E - Pantai Loh Sari (Ruas No. 241) dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

- 4) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang meliputi Peningkatan Jalan RT.7 Desa Pemalongan Kec. Bajuin, Peningkatan jalan teluk Pulantan Desa Bati-Bati Kec. Bati Bati, Peningkatan Jalan Pelita Raya RT.07/03 Ds.Ujung Baru Kec. Bati-Bati, Peningkatan Jalan RT.6 Desa Ambawang Kec. Batu Ampar, Peningkatan Jalan RT.2 Desa Gunung Mas Kec. Batu Ampar, Peningkatan Jalan Desa Handil Gayam Kec. Bumi Makmur, Peningkatan Jalan Poros Desa Galam Kec. Bajuin, Peningkatan Jalan Desa Sumber Jaya RT 3, 6, 7, 9, 10 Kec. Kintap, Peningkatan Jalan Desa Sebambar Baru Kec. Kintap, Peningkatan Jalan Dusun Desa Mekarsari Kec. Kintap, Peningkatan Jalan Desa Batu Mulia Kec. Panyipatan, Peningkatan Jalan Simpang Empat Atilam - Kunyit Desa Pabahanan Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Atu-Atu Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Desa Sungai Kembang Desa Gunung Makmur Kec. Takisung, Peningkatan Jalan RT.15 Desa Takisung Kec. Takisung, Peningkatan Jalan Raya Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang, Peningkatan Jalan Desa Asam-Asam - Muara Asam-Asam Kec. Jorong, Peningkatan Jalan Poros Desa Sukorejo – Sabuhur, Peningkatan Jalan Kerasik Desa Bentok Darat Kec. Bati-Bati, Peningkatan Jalan Desa Ujung Baru RT.5/6 Jl. Lembenteng Kec. Bati-Bati, Siring Jalan Galam - Pemalongan Kec. Bajuin, Pengaspalan Gang Melati Jalan Niaga Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Dua Mas Putra dan Jalan 2005 Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Ranggung - Pasar Ranggung RT. 9 Kec. Takisung, Peningkatan Jalan Bakti Gang Tromol Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Menuju Pasar Hewan Sarang Halang Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Kuburan-Raden Desa Tambang Ulang Kec. Tambang Ulang, Pengaspalan Jalan Desa Asam-Asam RT.2 Kec. Jorong, Pengaspalan Jalan Desa Asam-Asam RT. 8 Kec. Jorong, Pengaspalan Jalan Komplek Kijang Mas Kec. Pelaihari, Pengaspalan Jalan Sarang Halang RT. 8 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari, Pengaspalan Jalan A. Saleh / A. Kadir Desa Padang Kec. Bati-Bati, Pengaspalan Jalan Poros Kayu Abang - Bingkulu 5 dan 6 Kec. Tambang Ulang, Pengaspalan Jalan Pertanian Ubudiyah RT.8 Kec. Bati-Bati, Pengaspalan Jalan H. Atak Rasyidi RT. 8 Kec. Bati-Bati, Pengaspalan Jalan Keluarga RT. 6 dan Desa Ujung RT. 2 Kec. Bati-Bati, Pengaspalan Jalan Desa Tabanio Kec. Takisung, Pengaspalan Jalan Desa Pagatan Besar

- Kec. Takisungdan kegiatan lain terkait dengan tugas dan fungsi.
- 5) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Reguler) yang meliputi Jasa konsultan pengawas dan konsultan survey jalan sebanyak 11 dokumen terdiri dari Konsultan pengawas jalan sebanyak 5 dokumen yaitu Konsultan Pengawas Jalan sungai rasau - pantai harapan (ruas no. 85), Konsultan Pengawas Jalan Padang Luas - Gunung Raja (ruas No. 24) , Konsultan Pengawas Jalan Gunung Makmur - Kuala Tambangan (Ruas No.15), Konsultan Pengawas Jalan Balirejo - Bajuin (Ruas No. 9), Konsultan Pengawas Jalan Sabuhur - Panyipatan (Ruas No. 29). Konsultan survey sebanyak 6 dokumen yaitu Jalan Wilayah 1 (Pelaihari), dan Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan sungai rasau - pantai harapan (ruas no. 85), Peningkatan Stuktur dan Kapasitas Jalan Padang Luas - Gunung Raja (Ruas No.24), Peningkatan Stuktur dan Kapasitas Jalan Gunung Makmur - Kuala Tambangan (Ruas No.15), Peningkatan Stuktur dan Kapasitas Jalan Balirejo - Bajuin (Ruas No. 9), Peningkatan Stuktur dan Kapasitas Jalan Sabuhur - Panyipatan (Ruas No. 29) dan kegiatan lain terkait dengan tugas dan fungsi.
 - 6) Kegiatan yang mendukung rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Penugasan) yang meliputi Jasa Konsultasi Pengawasan 2 dokumen yaitu Konsultan Pengawas Jalan Karang Rejo Trans 300 (Ruas No.252), Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Jorong-Sei.Pampan (Ruas No.79) dengan pekerjaan Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan Karang Rejo Trans 300 (Ruas No.252), Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan Jorong-Sei.Pampan (Ruas No.79) dan kegiatan lain terkait dengan tugas dan fungsi..

Indikator 5 : Persentase Penyediaan Prasarana Air baku

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan pembuatan embung sebagai penampung air untuk pertanian dan perkebunan dan tercapai 100%, meliputi Pembuatan Embung Dusun Wonosari Desa Batu Mulya Kec. Panyipatan, Pembuatan Embung Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari, Pembuatan Embung Desa Kintap Kecil Kec. Kintap, Pembuatan Embung Desa Benua Raya dan Desa Padang Kec. Bati-Bati dan Pembuatan Embung Desa Labuan Amas Kec. Bumi Makmur, dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

Sasaran 2 : Meningkatkan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air

Tahun 2019, untuk mencapai ini telah dilaksanakan melalui :

- 1) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong, dengan anggaran Rp. 6.330.109.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.675.124.300,- atau 42,26%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 2 (dua) indikator sasaran yaitu :

- 1) Luas sawah yang dapat dilayani (diiri dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik
- 2) Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5
Capaian per Indikator Sasaran 2**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %
2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Luas Sawah yang dapat dilayani (diiri dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	14.401,84 Ha	99,8	99,8
		Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	94,2 %	93,52	93,52

Indikator 1: Luas sawah yang dapat dilayani (diiri dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan pembangunan pintu air, bangunan penunjang lainnya, serta perencanaan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Dimana kegiatan tersebut meliputi pembangunan konstruksi jembatan pertanian Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur, jembatan pertanian Desa Tungkaran Kec. Pelaihari dan jembatan pertanian Desa Kurau Kec. Kurau, pembangunan konstruksi Pembuatan pintu air Desa Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur, Pembuatan pintu air Desa Bati-Bati dan Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati, Pembuatan pintu air/cangdam desa Tungkaran, Desa Atu-Atu dan Pembuatan

pintu air beramban Kec. Pelaihari, Pembuatan pintu air Desa Sarikandi dan Desa Padang Luas Kec. Kurau. Perencanaan Pembuatan Embung, Talud, Siring, Pintu Air, Normalisasi Saluran, Survey Inventarisasi Sungai wilayah Kab. Tanah Laut. Dan Pembangunan Konstruksi Pembuatan Embung Dusun Wonosari desa Batu Mulya Kec. Panyipatan, Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari, Desa Kintap Kecil Kec. Kintap, Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati, Desa Labuan Amas Kec. Bumi Makmur dan desa Padang Kec. Bati-Bati.

Indikator 2 : Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan pembangunan talud irigasi, pembangunan siring sungai, pembuatan bangunan pemecah ombak. Dimana kegiatan tersebut meliputi pembangunan konstruksi Talud Irigasi Desa Asam Jaya Kec. Jorong, Desa Bentok Kampung Kec. Bati-Bati, Desa Kampung Baru dan desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari. Konstruksi pembangunan siring sungai Kel. Angsau. Kec. Pelaihari, Desa Tambak Karya Kec. Kurau, Desa Handil Gayam Kec. Bumi Makmur, Desa Kintapura Kec. Kintap, Siring Bangungan Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari, Siring Embung Desa Sebamban Baru Kec. Kintap, Siring Sungai Intake PDAM IKK Jorong, Siring Penahan Abrasi Desa Swarangan Kec. Jorong dan Pembuatan Bangunan Pemecah Ombak Desa Mara Kintap Kec. Kintap.

Sasaran 3 : Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi

Tahun 2019, untuk mencapai ini telah dilaksanakan melalui :

- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan anggaran sebesar Rp. 26.618.414.590 dan terealisasi sebesar Rp25,411,088,163 atau 95,29%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 2 (dua) indikator sasaran yaitu :

- 1) Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman

2) Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian per Indikator Sasaran 3

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman	37,86 %	38,02 %	100,42
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak	51,65 %	51,65 %	100

Indikator 1: Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan prasarana dan sarana air minum yang aman dan tercapai 100,42%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan yang mendukung penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah meliputi pembangunan sumur bor yaitu di RT 10 dan dan RT 12 Kecamatan Panyipatan, Pembangunan IPA Kap. 30ltr/detik IKK Pelaihari dan sarana penunjang lainnya, Pemasangan Jaringan Perpipaan Desa Padang Luas Kec. Kurau, Pemasangan Jaringan Perpipaan Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur, Pemasangan Jaringan Perpipaan Jl. Sabrina dan Jl. Kebun Sayur Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi. Ada 2 kegiatan pembangunan sumur bor yang batal dilaksanakan yaitu pembangunan sumur bor di RT 7 dan RT 7 Kecamatan Panyipatan disebabkan karena tidak mendapatkan sumber air dilokasi.
- 2) Kegiatan yang mendukung penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK PENUGASAN) meliputi Pengembangan Jaringan Perpiaan SPAM Regional Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur, dan kegiatan lain terkait dengan tugas dan fungsi.

Indikator 2 : Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan perpipaan untuk akses sanitasi atau air limbah masyarakat dan tercapai 100%, dengan kegiatan prasarana dan sarana air limbah (DAK Reguler) yang meliputi Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal (5-10 KK) Desa Bati-Bati, Desa Benua Raya dan Desa Pandahan Kec. Bati-Bati, Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal (5-10 KK) Desa Sungai Rasau dan Desa Pantai Harapan Kec. Bumi Makmur dan Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal (5-10 KK) Desa Ujung Batu Kec. Pelaihari serta kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

Sasaran 4 : Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW.

Tahun 2019, untuk mencapai ini telah dilaksanakan melalui :

- 1) Program Program Perencanaan Tata Ruang, dengan anggaran sebesar Rp 1.738.107.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.200.353.697,00 atau 69,06%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 1 (satu) indikator sasaran yaitu :

- 1) Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian per Indikator Sasaran 4

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %
4	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	100 %	100%	100

Indikator : Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang untuk mendukung kesesuaian ruang dengan RTRW

tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan sosialisasi peraturan Perundang undangan tentang rencana tata ruang. Kegiatan ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan aparat desa atau kelurahan mengenai peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yaitu peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan dan pola ruang. Sosialisasi ini dilakukan setiap kecamatan di Kabupaten Tanah laut dan mengundang aparat / perangkat desa / kelurahan yang ada di masing masing Kecamatan.
- 2) Kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang. Kegiatan ini untuk menyusun pola ruang yang lebih detail dan terperinci mengenai pemanfaatan ruang disebuah bagian wilayah perencanaan (BWP). Adapun dokumen yang dihasilkan pada kegiatan ini diantaranya Dokumen RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Pelaihari yang meliputi dokumen laporan pendahuluan, dokumen laporan fakta analisa, dokumen laporan akhir, zoning regulation dan album peta, dokumen KLHS dan dokumen naskah penelitian. Dokumen untuk proses lagalisasi RDTR dan PZ BWP Bati-Bati yang meliputi dokumen teknis RDTR dan PZ BWP Bati-Bati, rekomendasi gubernur, persetujuan substansi peta dari BIG, persetujuan dari Kemntrian Agraria dan TR, raperda RDTR dan PZ BWP Bati-Bati dan dokumen validasi KLHS
- 3) Kegiatan rapat koordinasi tentang rencana tata ruang. Kegiatan ini dilakukan untuk proses pemanfaatan ruang yang terkendala masalah aturan yang berlaku dengan kegiatan eksisting yang sudah terbangun atau terlaksana dan atau masalah pemanfaatan ruang yang harus diselesaikan dengan masukan antar SKPD dalam forum Tim Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (TKPRD).

Sasaran 5 : Meningkatkan pemanfaatan tanah Negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan.

Tahun 2019, untuk mencapai ini telah dilaksanakan melalui :

- 1) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan anggaran sebesar Rp. 68.140.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 25.410.000,- atau 37,29%..

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 1 (satu) indikator sasaran yaitu :

- 1) Persentase teridentifikasinya tanah Negara.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian per Indikator Sasaran 5

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %
5	Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	Persentase teridentifikasinya tanah negara	100%	40%	40

Indikator : Persentase teridentifikasinya tanah negara.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengidentifikasian tanah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah terkait dengan administrasi tanah yang berguna untuk penataan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kegiatan pembangunan yang bermanfaat untuk mereka dan tercapai 40%. Dari 10 lokasi/titik yang ditargetkan dalam pengidentifikasi tanah Negara, hanya mampu terealisasi 4 lokasi/titik. Kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah meliputi kegiatan pelayanan administrasi pertanahan, kegiatan yang berkaitan dengan redistribusi Tanah Obyek Landrefrom (TOL) kegiatan dari BPN Kab. Tanah Laut dan kegiatan pembuatan surat Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).

Sasaran 6 : Meningkatkan penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut.

Tahun 2019, untuk mencapai ini telah dilaksanakan melalui :

- 1) Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan, dengan anggaran sebesar

Rp. 88.296.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.958.000,- atau 30,97%..

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 1 (satu) indikator sasaran yaitu :

- 1) Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah negara.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian per Indikator Sasaran 6

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %
6	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah	100%	33%	33,33

Indikator : Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan memfasilitasi konflik/sengketa pertanahan yang disampaikan atau dilaporkan kepada pemerintah daerah melalui Bidang Pertanahan Dinas PUPRP. Konflik/sengketa yang terjadi baik antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, maupun antar masyarakat dengan perusahaan/swasta ataupun antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Terkait konflik/sengketa lahan/tanah ini hanya bisa difasilitasi kalau ada laporan dari kelompok masyarakat atau dari swasta yang masuk ke Dinas PUPRP. Fasilitasi ini meliputi musyawarah antar kelompok yang berkonflik/bersengketa, melakukan pengecekan terhadap dokumen – dokumen terkait lahan/tanah yang disengketakan, melakukan pengukuran ke lapangan terkait lahan/tanah yang disengketakan. Tahun 2019 ada 1 laporan konflik/sengketa saja yang masuk ke Bidang Pertanahan Dinas PUPRP, dari 3 yang ditargetkan. Karena hanya satu konflik/sengketa saja yang disampaikan/dilaporkan maka yang dapat difasilitasi juga sebanyak 1 konflik/sengketa tersebut.

B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017, 2018 dan 2019.

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian IKU Tahun 2017, 2018 dan 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2017	Realisasi 2017	
1	Meningkatkan infrastruktur ke-PU-an	1	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89 %	89%	89%	89%	80,61%	70,61%
		2	Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik	84 %	84%	84%	80,84%	82%	75,91%
		3	Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	25 Unit	25 Unit	11 Unit	11 Unit	35 Unit	35 Unit
		4	Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	21,215 Km	27,003 Km	702,47 Km	650,83 Km	690,63 Km	863,29 Km
		5	Persentase Penyediaan Prasarana Air baku	19 %	19%	90%	80%	80%	80%
2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	1	Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	14.401,84 Ha	14.373,24 Ha	15.130,9 Ha	13.617,81 Ha	13.262,89 Ha	13.262,89 Ha
		2	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	94,2 %	88,1%	90%	88%	87%	87%
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	1	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman	37,86 %	38,02 %	68%	68%	45,19%	45,19%
		2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak	51,65 %	51,65%	2620	2620	1950	1950
4	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	1	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	100 %	100%	70%	70%	100%	100%
4	Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	1	Persentase teridentifikasinya tanah negara	100%	40%	0	0	30	10

6	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah	100%	33,33%	1	0	5	3
---	---	---	---	------	--------	---	---	---	---

Analisa perbandingan capaian indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dapat diuraikan sebagai berikut :

Bidang Bina Marga.

Sasaran 1 : Meningkatnya infrastruktur ke PU an.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 2 (dua) indikator sasaran yaitu :

Indikator 3 : Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (mantap).

Pada tahun 2017 ditarget cukup besar yaitu sebanyak 35 Unit jembatan dan terealisasi 100%, sedangkan tahun 2018 hanya ditargetkan sebanyak 11 unit jembatan dengan realisasi 15 unit atau sebesar 136,36 %. Untuk tahun 2019 ditarget 16 Unit jembatan dan terealisasi 25 unit atau 156,25%. Pembangunan jembatan di Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun selalu dilakukan walaupun kenaikan tiap tahunnya tidak merata, diharapkan dengan bertambahnya jembatan bisa membantu masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut

Indikator 4 : Jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap).

Pembangunan jalan di Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun selalu dilakukan untuk mendukung kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut, dari total panjang jalan di Kabupaten Tanah Laut yaitu 1826,63 Km sudah mencapai 53,05 % jalan di Kabupaten Tanah Laut dalam kondisi baik dan sedang (mantap). Ditahun 2017 dari target sepanjang 136,394 Km, dengan realisasi yaitu sepanjang 139,64 Km atau sebesar 102,38%. Pada tahun 2018 targetnya menjadi 69,238 Km dengan realisasinya sebesar 78,654 Km dari keseluruhan yang ditargetkan atau sebesar 113,60 %.

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Bina Marga

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2017	Realisasi 2017
1	Meningkatkan infrastruktur ke-PU-an	Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	25 Unit	25 Unit	11 Unit	11 Unit	35 Unit	35 Unit
		Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	21,215 Km	27,003 Km	702,47 Km	702,47 Km	690,63 Km	863,29 Km

Garfik 3.1
Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Bina Marga



Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi.

Sasaran 3 : Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 2 (dua) indikator sasaran yaitu :

Indikator 1 : Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman.

Capaian indikator persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman di Kabupaten Tanah Laut tahun 2017 dan 2018 ditargetkan cukup besar yaitu 2017

sebesar 45,15% dan tahun 2018 sebesar 68% yang mana realisasi di dua tahun tersebut mencapai 100%, sedangkan tahun 2019 hanya ditargetkan sebesar 37,86% atau sejumlah 1252 SR yang mana realisasi pada tahun 2019 terealisasi sepenuhnya atau 38,02%.

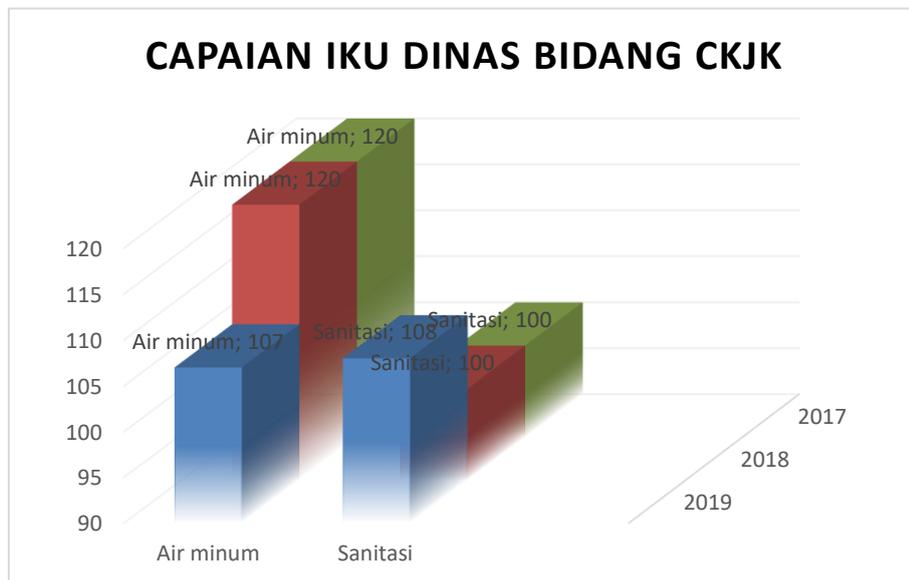
Indikator 2 : Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak.

Masalah sanitasi adalah termasuk juga masalah yang mendasar bagi masyarakat. Oleh karena itu setiap tahunnya juga ditargetkan cukup besar, agar masyarakat bisa terlayani apa yang menjadi kebutuhannya. Realisasi capaian kinerja yang ditargetkan setiap tahunnya terpenuhi sebesar 100 % bahkan untuk tahun 2019 realisasinya melebihi dari 100%. Dapat dikatakan tahun 2017 ditargetkan sebesar 1950 Jiwa dan Tahun 2018 ditarget 2620 Jiwa, untuk realisasinya capaian kinerjanya sebesar 100%. Sedangkan tahun 2019 dari yang ditarget 51,65% atau sebanyak 1205 Jiwa realisainya sebanyak 1205 Jiwa atau capaian kinerjanya sebesar 100%.

**Tabel 3.12
Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2017	Realisasi 2017
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman	37,86% / 1252 SR	38,02% / 1352 SR	68%/ 500 SR	120% / 600 SR	45,19% / 249 SR	120% / 299 SR
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak	51,65% / 1205 SR	51,65% / 1205 Jiwa	2620 Jiwa	2620 Jiwa	1950 Jiwa	1950 Jiwa

Grafik 3.2
Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi



Bidang Sumber Daya Air.

Sasaran 1 : Meningkatkan infrastruktur ke PU an.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 3 (tiga) indikator sasaran yaitu :

Indikator 1 : Persentase panjang sungai dalam kondisi baik.

Persentase panjang sungai dalam kondisi baik setiap tahun ditargetkan cukup besar dan terealisasi semuanya, pada tahun 2017 terdapat koreksi terhadap data yang digunakan, dimana terjadi perubahan data sungai di Kabupaten Tanah Laut, sehingga angka realisasi menjadi lebih kecil yaitu 70,61% dari yang ditargetkan sebesar 80,61%. Sedangkan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 89% dan terealisasi juga 89%, serta pada tahun 2019 ini dari target 89% juga terealisasi semuanya yaitu sebesar 89%.

Indikator 2 : Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik.

Persentase capaian jaringan irigasi yang berfungsi baik tahun 2017 dan tahun 2018

secara angka mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 82% realisasi 75,91% dan tahun 2018 ditargetkan 84% realisasi 80,84%, hal ini juga disebabkan oleh perubahan data luasan irigasi fungsional Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan tahun 2019 terealisasi 100% dari yang ditargetkan, dimana target pada tahun 2019 sebesar 89% teralisasi juga sebesar 89%.

Indikator 3 : Persentase penyediaan prasarana air baku.

Untuk indikator kinerja persentase penyediaan prasarana air baku setiap tahun terealisasi 100% dari yang ditargetkan setiap tahunnya, baik tahun 2017, 2018 maupun 2019. Penyediaan prasarana air baku salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, karena menyangkut salah satu kebutuhan utama masyarakat, baik hubungannya dengan pertanian, perkebunan atau juga sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Pada tahun 2017 ditargetkan 80% mampu terealisasi seluruhnya yaitu sebesar 80%, begitu juga di tahun 2019 dimana ditargetkan sebesar 19% mampu juga teralisasi seluruhnya atau 19%. Pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 90% hanya mampu terealisasi 80%, hal ini disebabkan masyarakat belum dapat memastikan ketersediaan lahan untuk lokasi pekerjaan pembangunan embung, sehingga pekerjaan tidak dapat direalisasikan.

Sasaran 2 : Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 2 (dua) indikator sasaran yaitu :

Indikator 1 : Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik.

Sebagian masyarakat Kabupaten Tanah Laut memiliki profesi atau pekerjaan sebagai petani atau mempunyai sawah, sehingga perlu pemerintah daerah memberikan perhatian juga terkait sawah – sawah yang dimiliki masyarakat apakah bisa diairi dengan irigasi – irigasi yang ada. Untuk indikator ini pemerintah daerah berusaha agar sawah – sawah yang dimiliki oleh masyarakat bisa teraliri air dengan baik, oleh sebab itu target luas sawah yang dapat dilayani (diari dan dibuang) oleh jaringan irigasi

kondisi baik setiap tahunnya diharapkan bisa terealisasi seluruhnya dari yang ditargetkan. Tahun 2017 dari target 13.262,89 Ha yang ditargetkan teralisasi 100%, tahun 2018 dari yang ditargetkan 15.130,9 Ha hanya teralisasi sebesar 13.617,81 Ha atau sebesar 90% saja dan pada tahun 2019 dari yang ditargetkan sebesar 14.401,84 Ha dengan realisasi sebesar 14.373,24 Ha atau 99,8%%. Tahun 2018 dan tahun 2019 sedikit mengalami penurunan hal ini disebabkan setelah dilakukan pendataan, jumlah konstruksi jaringan irigasi terbangun yang mengalami kerusakan mengalami peningkatan, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan untuk memaksimalkan layanan.

Indikator 2 : Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air.

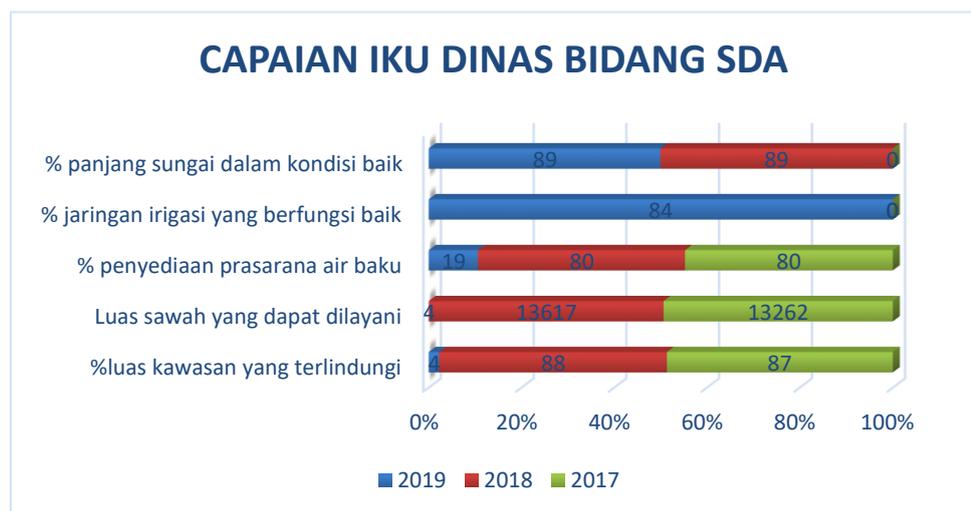
Terkait indikator ini, juga sangat membantu sekali kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal pada areal pesisir sungai maupun pantai. Karena sangat rawan bagi pemukiman masyarakat maupun fasilitas umum di sekitarnya mengalami bencana yaitu mengalami resiko abrasi. Maka perlu dibangun konstruksi siring dan lain-lainnya untuk melindungi dari resiko abrasi tersebut. Oleh sebab itu persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air, setiap tahunnya memang ditargetkan cukup besar. Sedangkan untuk realisasinya sendiri, pada tahun 2017 dari yang ditargetkan sebesar 87% terealisasi sebesar 87% juga, tahun 2018 mengalami penurunan dari yang ditargetkan sebesar 90% hanya terealisasi sebesar 88%, sedangkan untuk tahun 2019 dari yang ditargetkan sebesar 94,2% yang terealisasinya sebesar 88,1%. Penurunan capaian kinerja di dua tahun terakhir ini disebabkan karena luasan daerah yang perlu perlindungan akibat daya rusak air mengalami peningkatan, sehingga faktor pembagiannya menjadi lebih besar.

**Tabel 3.13
Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Sumber Daya Air**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2017	Realisasi 2017
1	Meningkat infrastruktur ke-PU-an	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89 %	89%	89%	89%	80,61%	70,61%
		Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik	84 %	84%	84%	80,84%	82%	75,91%

		Persentase Penyediaan Prasarana Air baku	19 %	19%	90%	80%	80%	80%
2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	14.401,84 Ha	14.373,24 Ha	15.130,9 Ha	13.617,81 Ha	13.262,89 Ha	13.262,89 Ha
		Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	94,2 %	88,1%	90%	88%	87%	87%

Grafik 3.3
Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Sumber Daya Air



Bidang Tata Ruang.

Sasaran 3 : Meningkatnya kesesuaian ruang dengan RTRW.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 1 (satu) indikator sasaran yaitu :

Indikator 1 : Persentase kesesuaian tata ruang dengan RTRW

Setiap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut harus memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten Tanah Laut baik untuk pengembangan industri, perhubungan, pariwisata, pertanian dan perikanan,

sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 – 2036. Maka dari itu setiap tahunnya baik target maupun realisasinya diharapkan capaian kinerja sebesar 100%. Dimana bahwa setiap rencana pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan Perda RTRW yang ditetapkan. Pada tahun 2017 ditargetkan 100% atau 54 dokumen pertimbangan teknis yang disusun, terealisasi 100%. Tahun 2018 ditargetkan 70% atau 58 dokumen pertimbangan teknis yang terealisasi juga 70% atau 58 dokumen pertimbangan teknis tersusun seluruhnya. Untuk tahun 2019 ditargetkan 100% atau 87 dokumen pertimbangan teknis, terealisasi juga seluruh dokumen. Maka untuk capaian ditahun 2017, 2018 dan 2019 semuanya 100%.

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Tata Ruang

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2017	Realisasi 2017
3	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	100 %	100%	70%	70%	100%	100%

Grafik 3.4
Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Tata Ruang

CAPAIAN IKU DINAS BIDANG TATA RUANG



Bidang Pertanahan.

Sasaran 4 : Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 1 (satu) indikator sasaran yaitu :

Indikator 1 : Persentase teridentifikasinya tanah negara

Untuk indikator persentase teridentifikasinya tanah negara tahun 2017 dan 2019 ditargetkan 100% atau 30 lokasi pada tahun 2017 dan 10 lokasi pada tahun 2019. Dari yang ditargetkan tersebut hanya dapat terealisasi pada tahun 2017 sebanyak 10 lokasi atau 33,33% dan pada tahun 2019 terealisasi 1 lokasi atau 40% dari yang ditargetkan pada masing-masing tahun tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembangunan yang terindikasi di atas tanah negara. Sedangkan pada tahun 2018 tidak ditargetkan maka secara otomatis juga tidak ada realisasinya.

Sasaran 5 : Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 1 (satu) indikator sasaran yaitu :

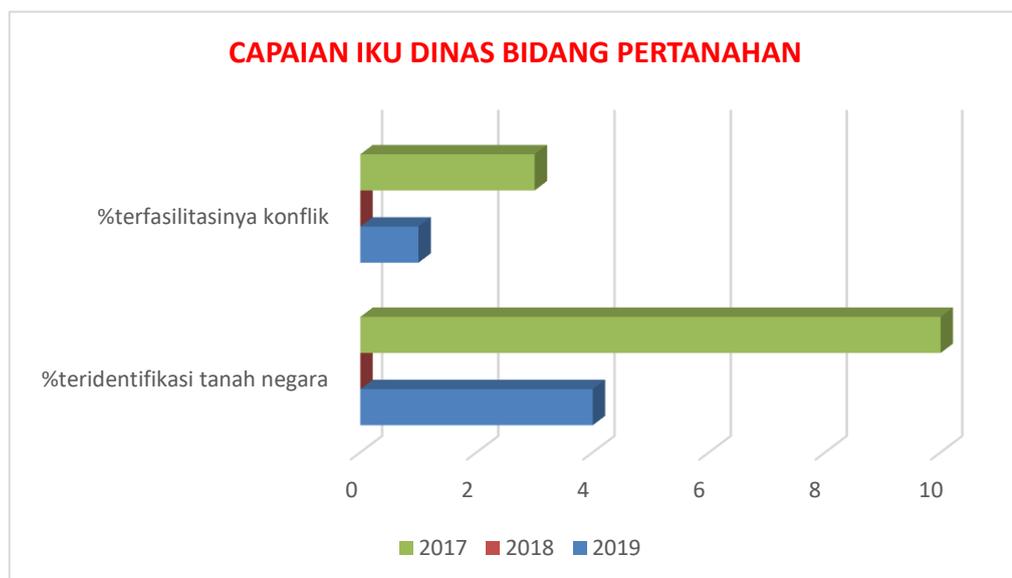
Indikator 1 : Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah negara.

Untuk indikator persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah negara, dari yang ditargetkan setiap tahunnya, tidak semuanya dapat direalisasikan. Bahkan untuk tahun 2018 dari yang ditargetkan cuma 1 konflik tidak bisa terealisasi. Sedangkan pada tahun 2017 dari yang ditargetkan 5 konflik teralisasi hanya 3 konflik saja yang dapat difasilitasi atau sebesar 60%. Sedangkan pada tahun 2019 dari yang ditargetkan 3 konflik hanya mampu terealisasi 1 konflik yang difasilitasi atau sebesar 33,33%.

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Pertanahan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2017	Realisasi 2017
1	Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	Persentase teridentifikasinya tanah negara	100% / 10 Lokasi	40% atau 4 lokasi.	-	-	30	10
2	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah	3 konflik	33,33% atau 1 konflik saja	1	0	5	3

Grafik 3.5
Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Pertanahan



C. Capaian Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana tertuang didalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut memiliki 4 sasaran strategis yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik dengan indikator Indeks

Kepuasan Masyarakat

Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi Pelayanan Publik dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Sasaran 3: Meningkatnya Infrastruktur ke PU an, yang memiliki 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik
2. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
3. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak

Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten

Tabel 3.16
Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %
1	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat			
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi Pelayanan Publik	Nilai SAKIP DPUPR	70	-	-
3	Meningkatnya Infrastruktur ke PU an	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	38 %/ 21.215 Km	27,003 Km	127,3%
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	84%	84%	100
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	65%/ 1252 SR	1352 SR	108
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten	100%	100%	100

D. Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017,2018 dan 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		2019		
			2017	2018	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	37,5	75	70	75	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi Pelayanan Publik	Nilai SAKIP DPUPR	65,20	66,80	70	-	-
3	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	863,29 Km	650,83 Km	38 % / 21.215 Km	27,003 Km	127,3
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	75,91%	80,84%	84%	84%	100
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	45,19%	68%	65% / 1252 SR	1352 SR	108
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten	100%	70%	100%	100%	100%

Uraian Capaian Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Pada sasaran startegis Meningkatkan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas dicapai melalui 5 (lima) indikator :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada indikator ini dapat dijelaskan bahwa kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan cukup memuaskan, khususnya pada pelayanan di UPT Peralatan dan UPT Laboratorium, walaupun dengan keterbatasan personil, sarana dan prasarana mampu melayani konsumen baik dari perusahaan atau dari masyarakat. Ini terlihat dari capaian IKM yang diperoleh setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2017 untuk UPT Laboratorium sudah melakukan penilaian terhadap indeks kepuasan masyarakat, sedangkan UPT Peralatan belum

melakukan penilaian terhadap indeks kepuasan masyarakat oleh sebab itu capaian untuk tahun 2017

2. Nilai SAKIP DPUPRP

Pada indikator ini capaian dari Nilai SAKIP DPUPRP setiap tahunnya mengalami peningkatan, ini bisa dilihat dari hasil penilaian yang disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. Walaupun masih ada beberapa kekurangan, tetapi selalu berusaha untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja pemerintah dan laporan-laporan lainnya lebih baik lagi. Untuk tahun 2019 realisasi capaian belum bisa dihitung karena belum ada penilaian/reviu dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

3. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik

Pada indikator ini tahun 2019 ditargetkan sebesar 38 % atau sepanjang 21.215 Km jalan kabupaten dari total seluruh panjang jalan kabupaten yaitu 1826,33 km terealisasi pada tahun 2019 melebihi dari yang ditargetkan yaitu sepanjang 27.003 Km atau dengan capaian 127,3%. Realisasi pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 sepanjang 863,29 Km dan realisasi pada tahun 2018 sepanjang 650,83 Km

4. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Pada indikator persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik ditahun 2019 ditargetkan sebesar 84% dan teralisasi juga sebesar 84% atau dengan capaian 100%

5. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak.

Untuk indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak tahun 2019 ditargetkan sebesar 65% atau sebanyak 1252 SR yang kemudian terealisasi melebihi dari yang ditargetkan yaitu sebesar 1353 SR atau dengan capaian 108%.

6. Persentase pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten

Pada indikator ini dapat dijelaskan bahwa dari yang ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 100%, mampu direalisasikan seluruhnya yaitu sebesar 100% juga atau dengan capaian 100% yaitu Pada tahun 2017 ditargetkan 100% atau 54 dokumen pertimbangan teknis yang disusun, terealisasi 100%. Tahun 2018 ditargetkan 70% atau 58 dokumen pertimbangan teknis yang terealisasi juga 70% atau 58 dokumen pertimbangan teknis tersusun seluruhnya. Untuk tahun

2019 ditargetkan 100% atau 87 dokumen pertimbangan teknis dan 2 dokumen RDTR yaitu untuk Kecamatan Pelaihari dan Kecamatan Bati-Bati, terealisasi juga seluruh dokumen. Maka untuk capaian ditahun 2017, 2018 dan 2019 semuanya 100%.

E. Capaian Indikator Kinerja Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Sekretariat

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.17
IKU Sekretariat

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	NILAI SAKIP	Sekretariat
2.	Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi}}{\text{Total sarana dan prasarana yang dibutuhkan}} \times 100 \%$	Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu}}{\text{Total dokumen perencanaan}} \times 100 \%$	Sekretariat
	Pelayanan Administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah dokumen keuangan yang tersusun tepat waktu}}{\text{Total dokumen keuangan}} \times 100 \%$	Sekretariat

2. Target Indikator Kinerja

Sebagaimana yang telah dibuat perjanjian kinerja, maka target Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Target 3.19
Target IKU Sekretariat Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	70

2	Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%
3	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%
4	Pelayanan Administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu	100%

3. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka capaian IKU Sekretaris DPUPRP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20
Target dan Capaian IKU Sekretariat Tahun 2109

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	70	94%
2	Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
4	Pelayanan Administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah didukung melalui:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Uraian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PUPRP

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 9.999.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.904.200,- atau 69,04%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 1 (satu) indikator sasaran, yaitu :

1) Nilai SAKIP DPUPRP

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	70	66,80	94%

Indikator : Nilai SAKIP Dinas PUPRP

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan laporan SAKIP yaitu, Penyusunan, Laporan Kinerja, Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Rencana Strategis, Pohon Kinerja. Dari dokumen – dokumen tersebut dilakukan penilaian oleh SKPD terkait untuk memberikan penilaian terhadap laporan SAKIP yang disampaikan.

Sasaran 2 : Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp. 6.076.906.560,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.921.761.525,- atau 80,99%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp. 641.887.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 604.038.000,- atau 99,10%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 1 (satu) indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan DPUPRP

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
2	Meningkatnya Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan DPUPRP	100%	100%	100%

2) Indikator : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan DPUPRP

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi umum, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan – kegiatan kantor atau kedinasan dan tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi tata kelola kesekretariatan, perkantoran, perencanaan kebutuhan, pencatatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pelayanan tamu, rapat-rapat dan lain-lain terkait dengan tugas dan fungsi.
- 2) Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, terkait tugas dan fungsi.
- 3) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan sarana kantor berupa meja kerja, kursi kerja, Hard disk, komputer, laptop dan lain-lainnya.
- 4) Kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sarana kantor.
- 5) Kegiatan yang mendukung fasilitasi Rapat-rapat dan koordinasi dengan instansi terkait melalui Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan.
- 6) Kegiatan yang mendukung fasilitasi Rapat-rapat dan koordinasi dengan instansi lainnya.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 9.999.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.904.200,- atau 69,04%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 1 (satu) indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.23
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 3**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
3	Meningkatnya kualitas perencanaan	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%

Indikator : Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan laporan – laporan yang disusun perencanaan yaitu Penyusunan Laporan Kinerja, Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Rencana Strategis, Pohon Kinerja, Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran, Laporan SPM dan laporan lainnya terkait tugas dan fungsi.

Sasaran 4 : Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- 1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran sebesar Rp. 30.203.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.690.000,- atau 94,99%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 1 (satu) indikator sasaran, yaitu :

2) Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 4

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%

Indikator : Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan yang disusun yaitu Laporan Fisik dan Keuangan, Laporan Triwulan Pengadaan Barang dan Jasa, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun laporan lainnya terkait tugas dan fungsi.

Bidang Bina Marga

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.25
IKU Bidang Bina Marga

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang	$\frac{\text{Panjang Jalan ditingkatkan}}{\text{Total Panjang Jalan}} \times 100 \%$	BM
2.	meningkatnya jumlah jembatan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Jumlah jembatan Kabupaten Kondisi Baik dan sedang	$\frac{\text{Jembatan ditingkatkan}}{\text{Total jumlah jembatan}} \times 100 \%$	BM

2. Target Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana yang telah dibuat perjanjian kinerja, maka target Indikator Kinerja Utama Bidang Bina Marga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26
Target IKU Bidang Bina Marga Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang	3,1%
2.	Meningkatnya jumlah jembatan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Jumlah jembatan Kabupaten Kondisi Baik dan sedang	4,9%

3. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka capaian IKU Bidang Bina Marga DPUPRP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27
Target dan Capaian IKU Bidang Bina Marga Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang	3,1%	3,1%
2	Meningkatnya jumlah jembatan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Jumlah jembatan Kabupaten Kondisi Baik dan sedang	4,9%	4,9%

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah didukung melalui:

- a) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- b) Program Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan

Uraian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran 1. Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- 2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan anggaran sebesar Rp 32.192.612.086,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.147.733.652,- atau 96,75 %.

- 3) Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan anggaran sebesar Rp. 75.935.026.204,- dan terealisasi sebesar Rp. 72.775.505.619,- atau 95,84 %.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang	3,1%	3,1%	100 %

Indikator 1 : Persentase kenaikan panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan, Pembangunan Jalan, Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK), Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Penugasan) dan tercapai 100%, dengan 6 kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan sebanyak 7 Dokumen yaitu, Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Kec. Pelaihari, Bajuin dan Batu Ampar Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Takisung, dan Panyipatan Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Tambang Ulang, dan Bati-Bati Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Kurau, dan Bumi Makmur Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Jorong, dan Kintap Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Pembangunan

Jalan Ke Pelabuhan, Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jalan ke Rumah Sakit di Kel. Sarang Halang

- 2) Kegiatan yang mendukung Pembangunan Jalan yaitu Perkerasan Jalan di Desa Tanjung Rt. 04 menuju Desa Tebing Siring Kec. Bajuin, Peningkatan Jalan Sambangan Menuju Makam Keramat Kec. Bati-Bati, Peningkatan Jalan Desa Bluru Kec. Batu Ampar, Perkerasan Jalan Desa Jilatan RT.6 Kec. Batu Ampar, Peningkatan Jalan Desa Jilatan Alur Kec. Jorong, Peningkatan Jalan Desa Handil Labuan Amas Rt. 04 dan Rt. 05 Desa Handil Labuan Amas Kec. Bumi Makmur, Perkerasan Jalan Desa Alur Sabuhur Kec. Jorong, Peningkatan Jalan Desa Sungai Cuka Kec. Kintap, Peningkatan Jalan Dusun 1 dan 2 Desa Kebun Raya Kec. Kintap, Perkerasan Jalan Desa Kintap Kecil Rt. 03, 06, 08 Kec. Kintap, Peningkatan Jalan Masuk SMA, SMP, MTS N 1 Kurau Kec. Kurau, Perkerasan Jalan di Rt. 16 Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan, Peningkatan Jalan Lingkungan Rt. 13 Desa Sungai Riam / Transos Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Rt. 3 Desa Kampung Baru Jalan Makam Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Rt. 1, 10, 4 Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Desa Gunung Makmur Kec. Takisung, Peningkatan Jalan Desa Sumber Makmur Kec. Takisung, TMMD Tahun 2019 Lokasi Martadah Baru Kec. Tambang Ulang, Peningkatan Jalan Desa sambangan jalan lentra kampung baru Kec. Bati-Bati, Peningkatan Jalan Alhikmah Kel. Angsau Pelaihari, Peningkatan Jalan gang rambutan kel angsau Pelaihari, Peningkatan Jalan kamaratih tembus pemuda dan Jalan Nusa Indah Gg. Khalid Ds. Panggung kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Bakti 2 RT.3 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Kepembatuan RT.5 Desa Telaga, Peningkatan Jalan Desa Tampang RT.4 Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Desa Tajau Mulia Kec. Batu Ampar , Peningkatan jalan Desa Pemalongan Kec. Bajuin, Peningkatan Jalan Menuju Rumah Sakit Sarang Halang Kec. Pelaihari, Pembangunan Jalan Kunyit - Angsau Kec. Pelaihari, Perkerasan Jalan Kijang Mas - Jalan Tirta Jaya Kec. Pelaihari, Perkerasan Jalan Pertanian (Jl. JBG) Desa Swarangan Kec. Jorong, Perkerasan Jalan Amparaya RT.8 RW.4 Balicak Subur Desa Kandangan Lama Kec. Panyipatan, Perkerasan Jalan Desa Arsi Mulya Kec. Jorong, Perkerasan Jalan Gunung Tembaga RT. 4 Desa Tampang Kec. Pelaihari, Perkerasan Jalan Kutai Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Pematuan RT. 5 - RT.10 Desa Telaga Kec. Pelaihari.

- 3) Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang meliputi jasa konsultan perencanaan sebanyak 7 Dokumen yang terdiri dari Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Pelaihari, Bajuin dan Batu Ampar Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Takisung, dan Panyipatan Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Tambang Ulang, dan Bati-Bati Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Kurau, dan Bumi Makmur Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Jorong, dan Kintap Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Jalan Rombongan Lima - Ranggung (Ruas No.5), Konsultansi Perencanaan Jalan Mekar Sari Trans Blok E - Pantai Loh Sari (Ruas No. 241).
- 4) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang meliputi Peningkatan Jalan RT.7 Desa Pemalongan Kec. Bajuin, Peningkatan jalan teluk Pulantan Desa Bati-Bati Kec. Bati Bati, Peningkatan Jalan Pelita Raya RT.07/03 Ds.Ujung Baru Kec. Bati-Bati, Peningkatan Jalan RT.6 Desa Ambawang Kec. Batu Ampar, Peningkatan Jalan RT.2 Desa Gunung Mas Kec. Batu Ampar, Peningkatan Jalan Desa Handil Gayam Kec. Bumi Makmur, Peningkatan Jalan Poros Desa Galam Kec. Bajuin, Peningkatan Jalan Desa Sumber Jaya RT 3, 6, 7, 9, 10 Kec. Kintap, Peningkatan Jalan Desa Sebamban Baru Kec. Kintap, Peningkatan Jalan Dusun Desa Mekarsari Kec. Kintap, Peningkatan Jalan Desa Batu Mulia Kec. Panyipatan, Peningkatan Jalan Simpang Empat Atilam - Kunyit Desa Pabahanan Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Atu-Atu Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Desa Sungai Kembang Desa Gunung Makmur Kec. Takisung, Peningkatan Jalan RT.15 Desa Takisung Kec. Takisung, Peningkatan Jalan Raya Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang, Peningkatan Jalan Desa Asam-Asam - Muara Asam-Asam Kec. Jorong, Peningkatan Jalan Poros Desa Sukorejo – Sabuhur, Peningkatan Jalan Kerasik Desa Bentok Darat Kec. Bati-Bati, Peningkatan Jalan Desa Ujung Baru RT.5/6 Jl. Lembenteng Kec. Bati-Bati, Siring Jalan Galam - Pemalongan Kec. Bajuin, Pengaspalan Gang Melati Jalan Niaga Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Dua Mas Putra dan Jalan 2005 Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Ranggung - Pasar Ranggung RT. 9 Kec. Takisung, Peningkatan Jalan Bakti Gang Tromol Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Menuju Pasar Hewan Sarang Halang Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Kuburan-Raden

Desa Tambang Ulang Kec. Tambang Ulang, Pengaspalan Jalan Desa Asam-Asam RT.2 Kec. Jorong, Pengaspalan Jalan Desa Asam-Asam RT. 8 Kec. Jorong, Pengaspalan Jalan Komplek Kijang Mas Kec. Pelaihari, Pengaspalan Jalan Sarang Halang RT. 8 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari, Pengaspalan Jalan A. Saleh / A. Kadir Desa Padang Kec. Bati-Bati, Pengaspalan Jalan Poros Kayu Abang - Bingkulu 5 dan 6 Kec. Tambang Ulang, Pengaspalan Jalan Pertanian Ubudiyah RT.8 Kec. Bati-Bati, Pengaspalan Jalan H. Atak Rasyidi RT. 8 Kec. Bati-Bati, Pengaspalan Jalan Keluarga RT. 6 dan Desa Ujung RT. 2 Kec. Bati-Bati, Pengaspalan Jalan Desa Tabanio Kec. Takisung, Pengaspalan Jalan Desa Pagatan Besar Kec. Takisung.

- 5) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Reguler) yang meliputi Jasa konsultan pengawas dan konsultan survey jalan sebanyak 11 dokumen terdiri dari Konsultan pengawas jalan sebanyak 5 dokumen yaitu Konsultan Pengawas Jalan sungai rasau - pantai harapan (ruas no. 85), Konsultan Pengawas Jalan Padang Luas - Gunung Raja(ruas No. 24) , Konsultan Pengawas Jalan Gunung Makmur - Kuala Tambangan (Ruas No.15), Konsultan Pengawas Jalan Balirejo - Bajuin (Ruas No. 9), Konsultan Pengawas Jalan Sabuhur - Panyipatan (Ruas No. 29). Konsultan survey sebanyak 6 dokumen yaitu Jalan Wilayah 1 (Pelaihari), dan Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan sungai rasau - pantai harapan (ruas no. 85), Peningkatan Stuktur dan Kapasitas Jalan Padang Luas - Gunung Raja (Ruas No.24), Peningkatan Stuktur dan Kapasitas Jalan Gunung Makmur - Kuala Tambangan (Ruas No.15), Peningkatan Stuktur dan Kapasitas Jalan Balirejo - Bajuin (Ruas No. 9), Peningkatan Stuktur dan Kapasitas Jalan Sabuhur - Panyipatan (Ruas No. 29) dan kegiatan lain-lain terkait dengan tugas dan fungsi.
- 6) Kegiatan yang mendukung rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Penugasan) yang meliputi Jasa Konsultasi Pengawasan 2 dokumen yaitu Konsultan Pengawas Jalan Karang Rejo Trans 300 (Ruas No.252), Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Jorong-Sei.Pampan (Ruas No.79) dengan pekerjaan Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan Karang Rejo Trans 300 (Ruas No.252), Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan Jorong-Sei.Pampan (Ruas No.79).

Sasaran 2. Meningkatnya jumlah jembatan kondisi mantap Kabupaten

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan anggaran sebesar Rp 32.192.612.086,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.147.733.652,- atau 96,75 %.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

- 2) Persentase Jumlah jembatan Kabupaten Kondisi Baik dan sedang

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya jumlah jembatan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Jumlah jembatan Kabupaten Kondisi Baik dan sedang	4,9%	4,9%	100%

Indikator : Persentase Jumlah jembatan Kabupaten Kondisi Baik dan sedang

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan dan Kegiatan Pembangunan Jembatan, dan tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1 Kegiatan Perencanaan Jembatan terealisasi sebanyak 5 dokumen yang terdiri dari Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Pelaihari, Bajuin dan Batu Ampar Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Takisung, dan Panyipatan Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Tambang Ulang, dan Bati-Bati Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Kurau, dan Bumi Makmur Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Jorong, dan Kintap Tahun 2020

2. Kegiatan yang mendukung Pembangunan Jembatan yaitu Rehab Jembatan Desa Bajuin Kec. Bajuin, Pembangunan Box Culvert Desa Jilatan Alur Kec. Jorong, Pembangunan Box Culvert Desa Handil Maluka Kec. Bumi Makmur, Pembangunan Box Culvert Desa Asri Mulya Kec. Jorong, Pembangunan Box Culvert Desa Kurau Kec. Kurau, Pembangunan Box Culvert Desa Suka Ramah Rt 14 Kec. Panyipatan, Pembangunan Box Culvert Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari, Pembangunan Box Culvert Desa Telaga Langsung Kec. Takisung, Pembangunan Box Culvert Desa Martadah RT. 4 Kec. Tambang Ulang, Pembangunan Box Culvert Transos Sungai Riam Kec. Pelaihari, Pembangunan Jembatan Desa Swarangan, Pembangunan Jembatan Desa Sumber Makmur, Pembangunan Jembatan Desa Sungai Bakau, Pembangunan Box Culvert Desa Kurau Jl. Kencana Kec. Kurau, Pembangunan Box Culvert Jl. Arah Pantai Turki Swarangan Kec. Jorong, Pembangunan Siring Pengaman Jembatan Desa Sabuhur (Pt. Golden), Pembangunan Box Culvert Desa Sumber Makmur Kec. Batu Ampar, Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Sungai Riam - Banua Tengah Kec. Pelaihari, Pelebaran Jembatan Ujung Batu Kec. Pelaihari, Rehabilitasi Box Crossing Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang, Pembangunan Jembatan Box Culvert Jl. Pertanian (Jl. JBG) Desa Swarangan Kec. Jorong, Pembangunan Jembatan Box Culvert Desa Bluru RT. 1 Kec. Batu Ampar, Pembangunan Jembatan Box Culvert Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari (Uk. 3 x 6 m).

Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.30
IKU Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan		Penanggung Jawab/ Sumber Data
		ESELON 3			
1	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Bersih	Jumlah RT yang mendapatkan akses air bersih	$\frac{\text{Total RT Kab. Tanah Laut}}{\text{Total RT Kab. Tanah Laut}}$	X 100% CKJK

		Persentase rumah tangga yang mendapatkan Akses Sanitasi	$\frac{\text{Jumlah RT yang mendapatkan akses sanitasi}}{\text{Total RT Kab. Tanah Laut}}$	X 100%	CKJK
2	Menurunnya wilayah yang terdampak genangan air	Persentase wilayah dengan drainase dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah panjang ruas jalan Kab. Tala}}$	X 100%	CKJK
3	Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi	Persentase tenaga jasa Konstruksi yang memiliki sertifikat	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikikasi}}{\text{Total tenaga konstruksi di Kab. Tanah Laut}}$ (persen tenaga konstruksi 2018 = 1,98% jumlah pekerja 2018 = 156.792 orang Sumber BPS Kab Tanah Laut : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab Tala 2018)	X 100%	CKJK
4	Meningkatnya pemenuhan fasilitas bangunan gedung dan fasilitas lainnya	Persentase bangunan gedung dan fasilitas lainnya yang dipenuhi	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung dan fasilitas lain yang terpenuhi}}{\text{Total kebutuhan gedung dan fasilitas lainnya}}$	X 100%	CKJK

2) Target Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana yang telah dibuat perjanjian kinerja, maka target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31
Target IKU Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	ESELON 3	
Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Bersih	1,80%
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan Akses Sanitasi	0,30%
Menurunnya wilayah yang terdampak genangan air	Persentase wilayah dengan drainase dalam kondisi baik	2,88%
Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi	Persentase tenaga jasa Konstruksi yang memiliki sertifikat	8,70%
Meningkatnya pemenuhan fasilitas bangunan gedung dan fasilitas lainnya	Persentase bangunan gedung dan fasilitas lainnya yang dipenuhi	100%

3) Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka capaian IKU Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32
Target dan Capaian IKU Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Bersih	1,80%	100,9%
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan Akses Sanitasi	0,30%	100%
2	Menurunnya wilayah yang terdampak genangan air	Persentase wilayah dengan drainase dalam kondisi baik	2,88%	100,8,7%
3	Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi	Persentase tenaga jasa Konstruksi yang memiliki sertifikat	8,70%	80%
4	Meningkatnya pemenuhan fasilitas bangunan gedung dan fasilitas lainnya	Persentase bangunan gedung dan fasilitas lainnya yang dipenuhi	100%	100%

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah didukung melalui:

- a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- b) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- c) Program Pengaturan Jasa Konstruksi
- d) Program Keciptakarya

Uraian Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran 1 : Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan anggaran sebesar Rp. 26.618.414.590 dan terealisasi sebesar Rp 25,411,088,163 atau 95,29%,

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 2 (dua) Indikator sasaran, yaitu :

- 2) Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih.

3) Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	
	ESELON 3				
Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi	1	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Bersih	1,80%	1,98%	100,9%
	2	Persentase rumah tangga yang mendapatkan Akses Sanitasi	0,30%	0,30%	100%

Indikator 1 : Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan prasarana dan sarana air minum dan tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan yang mendukung penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah meliputi pembangunan sumur bor yaitu di RT 10 dan dan RT 12 Kecamatan Panyipatan, Pembangunan IPA Kap. 30ltr/detik IKK Pelaihari dan sarana penunjang lainnya, Pemasangan Jaringan Perpipaan Desa Padang Luas Kec. Kurau, Pemasangan Jaringan Perpipaan Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur, Pemasangan Jaringan Perpipaan Jl. Sabrina dan Jl. Kebun Sayur Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi. Ada 2 kegiatan pembangunan sumur bor yang batal dilaksanakan yaitu pembangunan sumur bor di RT 7 dan RT 7 Kecamatan Panyipatan disebabkan karena tidak mendapatkan sumber air dilokasi.
- 2) Kegiatan yang mendukung penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK PENUGASAN) meliputi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Regional Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur, dan kegiatan lain terkait dengan tugas dan fungsi.

Indikator 2 : Persentase rumah tangga yang mendapatkan Akses Sanitasi.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan perpipaan untuk akses sanitasi atau air limbah masyarakat dan tercapai 100%, dengan kegiatan prasarana dan sarana air limbah (DAK Reguler) yang meliputi Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal (5-10 KK) Desa Bati-Bati, Desa Benua Raya dan Desa Pandahan Kec. Bati-Bati, Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal (5-10 KK) Desa Sungai Rasau dan Desa Pantai Harapan Kec. Bumi Makmur dan Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal (5-10 KK) Desa Ujung Batu Kec. Pelaihari serta kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

Sasaran 2. Meningkatnya wilayah yang terdampak genangan air.

Tahun 2019 ,untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui : Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan anggaran sebesar Rp. 8 042 611 776 dan terealisasi sebesar Rp 7,211,388,462 atau 89,66%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu : Persentase wilayah dengan drainase dalam kondisi baik.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.34
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2**

Sasaran Strategis	IndikatorSasaran	Target	Realisasi	Capaian
Menurunnya wilayah yang terdampak genangan air	1 Persentase wilayah dengan drainase dalam kondisi baik	2,88%	3,13%	108,7

Indikator 1 : Persentase wilayah dengan drainase dalam kondisi baik.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan drainase dan tercapai 108,7%, dengan kegiatan, yaitu :

Kegiatan yang mendukung Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

meliputi pembuatan drainase Dusun 1, 2 Desa Bumi Asih Kec. Panyipatan, Pembuatan Drainase Sidomulyo, Sundasa dan Wonosari desa Batu Mulya, Pembuatan Drainase RT 2 dan RT 3 Desa Ketapang Kec. Bajuin, Pembuatan Drainase Dusun 1, 2, 3, Jalan Poros Dusun I s/d IV Kec. Kintap, Pembuatan Drainase Jalan Poros Desa Pantai Linuh, RT 10/12 Desa Damit Hulu, Desa Damit, Desa Gunung Melati , RT 14 Desa Tajau Pecah, Desa Damar Lima, Desa Tajau Mulya, RT 1 s/d 9 Desa BlurubDesa Ambawang, Desa Jilatan Alur dan Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar, Pembuatan Drainase RT 3,5,10 Desa Sumber Mulia dan Jl. Darma Samping Mesjid Syuhada Kec. Pelaihari, serta jalan lingkungan Pasar Pelaihari Pembuatan Drainase Jalan Ilir RT 5/02 Desa Asam-Asam Kec. Jorong

Sasaran 3. Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi.

Tahun 2019 ,untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui : Program Pengaturan Jasa Konstruksi dengan anggaran sebesar Rp. 349.999.900 dan terealisasi sebesar Rp 161.206.486 atau 46,06%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu : Persentase tenaga jasa konstruksi yang memiliki sertifikat.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.35
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 3**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi	1 Persentase tenaga jasa konstruksi yang memiliki sertifikat.	8,70%	6,96%	80

Indikator 1 : Persentase tenaga jasa konstruksi yang memiliki sertifikat.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan dan kinerja personil badan usaha jasa konstruksi (tukang) dan tercapai 80 %, dengan kegiatan, yaitu : Kegiatan yang mendukung peningkatan pengetahuan dan kinerja personil badan

usaha jasa konstruksi (tukang) yaitu dengan melakukan pembelajaran kepada para tukang-tukang bangunan wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi Pelatihan Tenaga Tingkat Terampil 120 peserta, Pelatihan Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) diikuti 31 peserta, yang mana setelah mengikuti pembelajaran tersebut para peserta diberi sertifikat serta Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi yang diikuti 150 peserta.

Sasaran 4 : Meningkatnya pemenuhan fasilitas bangunan gedung dan fasilitas umum.

Tahun 2019 ,untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui : Program Keciaptakaryaan dengan anggaran sebesar Rp. 14.812.217.990 dan terealisasi sebesar Rp 14.025.724.000 atau 95%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu : Persentase bangunan gedung dan fasilitas lainnya yang dipenuhi.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.35
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 4**

Sasaran Strategis	IndikatorSasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pemenuhan fasilitas bangunan gedung dan fasilitas umum	1 Persentase bangunan gedung dan fasilitas lainnya yang dipenuhi	100%	100%	100

Indikator 1 : Persentase bangunan gedung dan fasilitas lainnya yang dipenuhi.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan gedung kantor baik sarana dan parasarana perkantoran, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana olag raga dan tercapai 100 % pada tahun berjalan, dengan kegiatan, yaitu :

Kegiatan yang mendukung pembangunan gedung kantor yaitu Pembangunan Gedung Kantor KODIM Kab. Tanah Laut, Penambahan sarana dan prasarana Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Tanah Laut, Pembangunan Pagar Depan dan Pintu

Gerbang MAN IC Kab. Tanah Laut, Penambahan Ruang Kelas Baru dan Kantor SMP Islam Nurul Hijrah Jorong, Pembangunan Pesantren Tahfiz Darul Qur'an Intoqomah Kec. Pelaihari, Pembangunan Gedung Serba Guna, Pembangunan Ruang Kantor Gedung Sekretariat DPRD Kab. Tanah Laut, Pembangunan Sarana Panjat Tebing Pelaihari, Pembuatan Pagar SMPN 19 Kec. Pelaihari, Pembangunan Pagar SDN Tajau Pecah 2, Pembangunan Pagar SDN Sarikandi Kec. Kurau, Pembangunan Pagar SDN Raden Kec. Kurau, Pembangunan Paving Blok halaman dan parkir sekolah SDN Pasir Putih Kec. Kintap, Pembangunan Paving Blok halaman dan parkir SDN Mekarsari Kec. Kintap, Pembangunan Paving blok halaman dan parkir sekolah SDN Kintap Kecil 2, Pembangunan Paving Blok halaman dan parker SDN Batalang Kec. Jorong, Pembangunan Paving Blok halaman dan parker SMPN 3 Takisung, Pembangunan Paving Blok halaman dan parkir SDN Sungai Pinang Kec. Tambang Ulang, Pembuatan Pondasi halaman sekolah SDN Muara Kintap 2,, pengurukan halaman sekolah SDN Kunyit 2 Kec. Bajuin, pembangunan pagar dan sarana pendukung Kantor Kec. Batu Ampar, pembangunan pagar dan sarana pendukung Kantor Kec. Pelaihari, Rehabilitasi Ruang Kerja Bidang Sumber Daya Air, Rehab Kantor Kecamatan Bati-Bati Kab. Tanah Laut, dan Rehabilitasi Rumah Negara Golongan 1 Reg. 006.

Bidang Tata Ruang

1) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.37
IKU Bidang Tata Ruang Tahun 2019

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan		Penanggung Jawab/ Sumber Data
1	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	$\frac{\text{Jumlah dokumen penyelenggaraan penataan ruang yang tersusun}}{\text{Total dokumen penyelenggaraan tata ruang yang direncanakan}}$	x 100%	Bidang Tata Ruang

2) Target Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana yang telah dibuat perjanjian kinerja, maka target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.38
Target IKU Bidang Tata Ruang Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100%

3) Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka capaian IKU Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.39
Target dan Capaian IKU Bidang Tata Ruang Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100%	98%

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah didukung melalui Program Perencanaan Tata Ruang.

Uraian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran 1 : Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Perencanaan Tata Ruang, dengan anggaran sebesar Rp 1.738.107.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.200.353.697,00 atau 69,06%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase penyelenggaraan penataan ruang.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.40
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100%	98%	100

Indikator : Persentase penyelenggaraan penataan ruang

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang untuk mendukung kesesuaian ruang dengan RTRW tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan sosialisasi peraturan Perundang undangan tentang rencana tata ruang. Kegiatan ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan aparat desa atau kelurahan mengenai peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yaitu peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan dan pola ruang. Sosialisasi ini dilakukan setiap kecamatan di Kabupaten Tanah laut dan mengundang aparat / perangkat desa / kelurahan yang ada di masing masing Kecamatan.
- 2) Kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang. Kegiatan ini untuk menyusun pola ruang yang lebih detail dan terperinci mengenai pemanfaatan ruang disebuah bagian wilayah perencanaan (BWP). Adapun dokumen yang dihasilkan pada kegiatan ini diantaranya Dokumen RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Pelaihari yang meliputi dokumen laporan pendahuluan, dokumen laporan fakta analisa, dokumen laporan akhir, zoning regulation dan album peta, dokumen KLHS dan dokumen naskah penelitian. Dokumen untuk proses lagalisasi RDTR dan PZ BWP Bati-Bati yang meliputi dokumen teknis RDTR dan PZ BWP Bati-Bati, rekomendasi gubernur, persetujuan substansi peta dari BIG, persetujuan dari Kemntrian Agraria dan TR, raperda RDTR dan PZ BWP Bati-Bati dan dokumen validasi KLHS

- 3) Kegiatan rapat koordinasi tentang rencana tata ruang. Kegiatan ini dilakukan untuk proses pemanfaatan ruang yang terkendala masalah aturan yang berlaku dengan kegiatan eksisting yang sudah terbangun atau terlaksana dan atau masalah pemanfaatan ruang yang harus diselesaikan dengan masukan antar SKPD dalam forum Tim Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (TKPRD).

Bidang Pertanahan

1) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.41
IKU Bidang Pertanahan

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan		Penanggung Jawab/ Sumber Data
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	Persentase Dokumen Administrasi Pertanahan untuk penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah	$\frac{\text{Jumlah IPPT dan Redistribusi (TOL) yang diterbitkan}}{\text{Total permohonan IPPT dan Redistribusi (TOL) yang masuk}}$	x 100	Bidang Pertanahan
2	Meningkatnya Penyelesaian Konflik/Sengketa tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian masalah pertanahan	$\frac{\text{Jumlah konflik/sengketa tanah yang difasilitasi}}{\text{Total konflik/sengketa tanah yang disampaikan}}$	x 100	Bidang Pertanahan
3	Meningkatnya inventarisasi aset pemerintah daerah dan fasilitas umum	Persentase data aset pemerintah daerah dan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah aset Pemda yang diberi titik koordinat}}{\text{Total aset Pemda yang terdata}}$	x 100	Bidang Pertanahan
4	Meningkatnya tertib administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum	Persentase administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah aset Pemda yang mempunyai toponimi/rupa bumi}}{\text{Total aset Pemda yang terdata}}$	x 100	Bidang Pertanahan

2) Target Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana yang telah dibuat perjanjian kinerja, maka target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.42
Target IKU Bidang Pertanahan Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	1	Persentase Dokumen Administrasi Pertanahan untuk penataan	100%

			pengusahaan penggunaan dan pemanfaatan tanah	
2	Meningkatnya Penyelesaian Konflik/Sengketa tanah di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase penyelesaian masalah pertanahan	100%
3	Meningkatnya tertib administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum	1	Persentase administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum	100%

3) Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka capaian IKU Bidang Peratanah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.43
Target dan Capaian IKU Bidang Pertanahan Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	1	Persentase Dokumen Administrasi Pertanahan untuk penataan pengusahaan penggunaan dan pemanfaatan tanah	100%	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Konflik/Sengketa tanah di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase penyelesaian masalah pertanahan	100%	33,33%
3	Meningkatnya tertib administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum	1	Persentase administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum	100%	100%

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah didukung melalui:

- a) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
- b) Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- c) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Uraian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan.

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- a) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah, dengan anggaran sebesar Rp. 68.140.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.410.000,- atau 37,29%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase Dokumen Administrasi Pertanahan Untuk Penataan Penguasaan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.44
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1**

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	1	Persentase Dokumen Administrasi Pertanahan untuk penataan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah	100%	220%	220

Indikator 1 : Persentase dokumen administrasi pertanahan untuk penataan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi pertanahan untuk penataan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah meliputi pelayanan administrasi pertanahan, permohonan yang disampaikan oleh BPN Kab. Tanah Laut terkait dengan redistribusi Tanah Obyek Landrefrom (TOL), pembuatan surat izin perubahan penggunaan tanah (IPPT)

Sasaran 2 : Meningkatkan penyelesaian konflik/sengketa tanah di Kabupaten Tanah Laut.

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- a) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, dengan anggaran sebesar Rp. 48.296.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.958.000,- atau 30,97%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.45
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2**

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya Penyelesaian Konflik/Sengketa tanah di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase penyelesaian masalah pertanahan	100%	0	0%

Indikator 1 : Persentase penyelesaian masalah pertanahan

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang meliputi memfasilitasi mereka yang berkonflik, baik antar kelompok masyarakat, masyarakat dengan swasta maupun masyarakat dengan pemerintah daerah. Terkait dengan konflik ini hanya satu yang dapat difasilitasi oleh Bidang Pertanahan, fasilitasi ini belum sampai pada tahap keputusan akhir, sehingga belum dapat dikatakan selesai. Karena untuk memfasilitasi penyelesaian konflik harus dilakukan beberapa tahapan. Selain musyawarah antara yang berkonflik, juga dilakukan pengukuran dilapangan terkait tanah/lahan yang disengketakan dan juga pemeriksaan terkait dokumen tanah/lahan yang disengketakan tersebut.

Sasaran 3 : Meningkatkan tertib administrasi penamaan rupabumi/toponimi pemda dan fasilitas umum.

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- a) Program Program Penataan Daerah Otonomi Baru, dengan anggaran sebesar Rp. 46.625.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.360.000,- atau 52,25%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.46
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 3

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
3	Meningkatnya tertib administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum	3	Persentase administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum	100%	100%	100%

Indikator 1 : Persentase administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan PenamaanRupabumi/Toponimi Tanah Pemerintah dan FasilitasUmum meliputi pemberian nama pada asset – asset pemerintah daerah maupun failitas umum baik itu suatu wilayah, daerah, tempat atau bangunan, baik itu aset pemerintah maupun fasilitas umum. Melakukan pengambilan titik koordinat penamaan rupabumi/toponimi, tanah pemerintah maupun fasilitas umum. Yang mana penamaan rupabumi/toponimi tersebut dibuat dalam suatu dokumen.

Bidang Sumber Daya Air

1) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.47
IKU Bidang Sumber Daya Air

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab/ Sumber Data
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Persentase luas baku sawah yang terlayani irigasi	$\frac{\text{Jumlah luas baku sawah yang terlayani irigasi}}{\text{Total luas seluruh sawah di Kab. Tala}} \times 100$	Bidang SDA
2	Meningkatnya kualitas saluran sungai	Persentase ketersediaan air baku	$\frac{\text{Jumlah air baku yang tersedia}}{\text{Total seluruh sungai di Kab. Tala}} \times 100$	Bidang SDA
		Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah panjang sungai dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang sungai di Kab. Tala}} \times 100$	Bidang SDA
		Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	$\frac{\text{Jumlah irigasi yang berfungsi baik}}{\text{Total irigasi di Kab. Tala}} \times 100$	Bidang SDA
		Persentase areal terlindungi daya rusak air	$\frac{\text{Jumlah areal yang terlindungi}}{\text{Total areal di Kab. Tala}} \times 100$	Bidang SDA

1) Target Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana yang telah dibuat perjanjian kinerja, maka target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.48
Target IKU Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	1	Persentase luas baku sawah yang terlayani irigasi	99,8%
2	Meningkatnya kualitas saluran sungai	1	Persentase ketersediaan air baku	19%
		2	Persentase panjang sungai dalam	89%

			kondisi baik	
		3	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	84%
		4	Persentase areal terlindungi daya rusak air	94,2%

4) Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka capaian IKU Bidang Peratanah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.49
Target dan Capaian IKU Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	1	Persentase luas baku sawah yang terlayani irigasi	99,8%	100
2	Meningkatnya kualitas saluran sungai	1	Persentase ketersediaan air baku	19%	100
		2	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89%	100,5
		3	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	84%	100

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah didukung melalui:

- a) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- b) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- c) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong

Uraian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran 1 : Meningkatkan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- a) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong, dengan anggaran Rp. 6.330.109.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.675.124.300,- atau 42,26%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

- 2) Persentase Persentase luas baku sawah yang terlayani irigasi.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.50
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	1	Persentase luas baku sawah yang terlayani irigasi	99,8 %	99,8%	100

Indikator 1 : Persentase luas baku sawah yang terlayani irigasi.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan pembangunan pintu air, bangunan penunjang lainnya, serta perencanaan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Dimana kegiatan tersebut meliputi pembangunan konstruksi jembatan pertanian Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur, jembatan pertanian Desa Tungkaran Kec. Pelaihari dan jembatan pertanian Desa Kurau Kec. Kurau, pembangunan konstruksi Pembuatan pintu air Desa Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur, Pembuatan pintu air Desa Bati-Bati dan Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati, Pembuatan pintu air/cangdam desa Tungkaran, Desa Atu-Atu dan Pembuatan pintu air beramban Kec. Pelaihari, Pembuatan pintu air Desa Sarikandi dan Desa Padang Luas Kec. Kurau. Perencanaan Pembuatan Embung, Talud, Siring, Pintu Air, Normalisasi Saluran, Survey Inventarisasi Sungai wilayah Kab. Tanah Laut. Dan Pembangunan Konstruksi Pembuatan Embung Dusun Wonosari desa Batu Mulya

Kec. Panyipatan, Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari, Desa Kintap Kecil Kec. Kintap, Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati, Desa Labuan Amas Kec. Bumi Makmur dan desa Padang Kec. Bati-Bati.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas saluran sungai

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- a) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan anggaran Rp. 17.234.577.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.900.191.150,- atau 81%.
- b) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 1.525.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 907.991.400,- atau 52,54%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 4 (empat) Indikator sasaran, yaitu :

- 2) Persentase Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.51
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2**

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya kualitas saluran sungai	1	Persentase ketersediaan air baku	19%	19%	100
		2	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89%	89,44%	100,5
		3	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	84%	84%	100
		4	Persentase areal terlindungi daya rusak air	94,2%	93,52	93.52

Indikator 1 : Persentase ketersediaan air baku

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan pembuatan embung sebagai penampung air untuk pertanian dan perkebunan dan tercapai 100%, meliputi Pembuatan Embung Dusun Wonosari Desa Batu Mulya Kec.

Panyipatan, Pembuatan Embung Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari, Pembuatan Embung Desa Kintap Kecil Kec. Kintap, Pembuatan Embung Desa Benua Raya dan Desa Padang Kec. Bati-Bati dan Pembuatan Embung Desa Labuan Amas Kec. Bumi Makmur, dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

Indikator 2 : Persentase panjang sungai dalam kondisi baik

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan saluran sungai dan tercapai 100,5% dengan kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai yaitu melakukan normalisasi Sungai Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung seluas 1.000 meter dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

Indikator 3 : Persentase rigasi kabupaten berfungsi baik

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan pemeliharaan jaringan irigasi dan pengadaan sarana mendukung kegiatan pertanian dan tercapai 84% meliputi pembangunan konstruksi Rehab Embung Desa Asam Jaya Kec. Jorong, Pengerukan Bendungan RT 01 dan RW 01 Desa Kait-Kait Kec. Bati-Bati, Rehab Tanggul Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati, Rehab Gorong-Gorong Beton Desa Muara Asam-Asam Kec. Jorong, Rehab Tanggul Pertanian Penahan Air Asin Desa Pantai Harapan Kec. Bumi Makmur, Rehab Jembatan Penyeberangan Petani Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan, Rehab Pintu Air Pumpung Desa Kunyit Kec. Bajuin, Peningkatan Jembatan Penyeberangan Desa Kait-Kait Kec. Bati-Bati dan Peningkatan Jembatan Penyeberangan Pertanian Desa Kintap Kecil Kec. Kintap dan kegiatan lain terkait tugas dan

Indikator 4 : Persentase areal terlindungi daya rusak air

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan pembangunan talud irigasi, pembangunan siring sungai, pembuatan bangunan pemecah ombak. Dimana kegiatan tersebut meliputi pembangunan konstruksi Talud Irigasi Desa Asam Jaya Kec. Jorong, Desa Bentok Kampung Kec. Bati-Bati, Desa Kampung Baru dan desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari. Konstruksi pembangunan siring sungai Kel. Angsau. Kec. Pelaihari, Desa Tambak Karya Kec. Kurau, Desa Handil Gayam Kec. Bumi Makmur, Desa Kintapura Kec.

Kintap, Siring Bangungan Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari, Siring Embung Desa Sebambar Baru Kec. Kintap, Siring Sungai Intake PDAM IKK Jorong, Siring Penahan Abrasi Desa Swarangan Kec. Jorong dan Pembuatan Bangunan Pemecah Ombak Desa Mara Kintap Kec. Kintap.

UPT Peralatan

1) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.52
IKU UPT Peralatan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab/Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya retribusi sewa Alat Berat	Persentase peningkatan retribusi daerah	$\frac{\text{Jumlah realisasi pendapatan sewa alat}}{\text{Total target pendapatan}} \times 100 \%$	UPT Peralatan
2.	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana Alat Berat	Persentase alat berat yang dipenuhi	$\frac{\text{Jumlah alat berat yang terpenuhi}}{\text{Total alat berat yang diperlukan}} \times 100 \%$	UPT Peralatan

2) Target Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana yang telah dibuat perjanjian kinerja, maka target Indikator Kinerja Utama UPT Peralatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.53
Target IKU UPT Peralatan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya retribusi sewa Alat Berat	Persentase peningkatan retribusi daerah	100%
2.	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana Alat Berat	Persentase alat berat yang dipenuhi	100%

3) Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka capaian IKU UPT Peralatan DPUPRP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.54
Target dan Capaian IKU UPT Peralatan Tahun 2019

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya retribusi sewa Alat Berat	Persentase peningkatan retribusi daerah	100%	158%
2	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana Alat Berat	Persentase alat berat yang dipenuhi	100%	75%

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah didukung melalui:

- a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT. Peralatan

Uraian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran 1: Meningkatkan retribusi sewa alat berat

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Peralatan, dengan anggaran sebesar Rp 402.374.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 229.778.294,- atau 57,11 %.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase peningkatan retribusi daerah

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.55
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1

SasaranStrategis	IndikatorSasaran	Target	Capaian	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya retribusi sewa Alat Berat	Persentase peningkatan retribusi daerah	100%	158%	158

Indikator 1 : Persentase peningkatan retribusi daerah

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan

Kegiatan pemeliharaan alat – alat berat yang ada di UPT Peralatan dan tercapai 173%, dengan kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional, di UPT peralatan ada beberapa alat berat yang dapat disewa baik oleh masyarakat maupun swasta diantara 1 buah motor grader 230, 1 buah motor grader 330, 1 buah tireroller, 1 buah vibrating roller 10 ton, 2 buah tandem roller 4,5 ton, 1 buah pendistribian roller, 1 buah rammer dan 1 buah plate compactor. Besarnya biaya sewa diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat Tandem Roller, Rammer dan Plate Compactor. Alat – alat berat tersebut selalu dilakukan pemeliharaan secara rutin dan sebelum disewa atau dipakai selalu dilakukan pengecekan terlebih dahulu sehingga dapat digunakan oleh masyarakat atau swasta. Walaupun dengan keterbatasan alat-alat berat yang ada di UPT Peralatan mampu menaikkan pendapatan sewa dari yang ditargetkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 111.750.000,- dan mampu terealisasi sebesar Rp. 193.350.000 atau ditargetkan Rp.111.750.000,- atau 173%.

Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana alat berat

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Peralatan, dengan anggaran sebesar Rp 402.374.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 229.778.294,- atau 57,11 %.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase alat berat yang dipenuhi

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.56
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Capaian	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya sarana dan prasarana alat berat	Persentase alat berat yang dipenuhi	100%	75%	75

Indikator 1 : Persentase alat berat yang dipenuhi

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan Kegiatan pemeliharaan alat – alat berat yang ada di UPT Peralatan dan tercapai 75%, dengan kegiatan, yaitu pada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional. Di UPT peralatan sebenarnya masih diperlukan untuk menambah alat-alat berat yang baru karena sebagian beberapa alat berat yang kondisinya tidak bisa digunakan lagi atau tidak terpakai disebabkan rusak berat. Namun karena keterbatasan anggaran belum mampu untuk membeli alat-alat berat yang baru, sehingga belum mampu memenuhi UPT Peralatan dengan alat berat yang lebih canggih untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui pendapatan sewa alat berat. Dari yang ditargetkan 100% pada tahun 2019 hanya mampu terpenuhi 75% atau dengan capaian 75% saja.

UPT Laboratorium

1) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.57
IKU UPT LABORATORIUM

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi	Persentase peningkatan retribusi daerah	$\frac{\text{Jumlah realisasi pendapatan sewa alat uji material konstruksi}}{\text{Total target pendapatan}} \times 100 \%$	UPT Laboratorium
2.	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi	Persentase alat uji material konstruksi yang dipenuhi	$\frac{\text{Jumlah alat uji material konstruksi yang terpenuhi}}{\text{Total alat uji material konstruksi yang diperlukan}} \times 100 \%$	UPT Peralatan

2) Target Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana yang telah dibuat perjanjian kinerja, maka target Indikator Kinerja Utama UPT Laboratorium adalah sebagai berikut :

Tabel 3.58
Target IKU UPT Laboratorium Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi	Persentase peningkatan retribusi daerah	100%
2.	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi	Persentase alat uji material konstruksi yang dipenuhi	100%

3) Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka capaian IKU UPT Laboratorium DPUPRP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut 9

Tabel 3.59
Target dan Capaian IKU UPT Laboratorium Tahun 2019

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi	Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi	100%	61%
2	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi	Persentase alat uji material konstruksi yang dipenuhi	100%	0%

Uraian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran 1 : Meningkatkan retribusi sewa alat uji material konstruksi

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran telah dilaksanakan melalui :

- a) Program Pengembangan Teknologi Konstruksi, dengan anggaran sebesar Rp 99.941.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 55.930.250,- atau 57,97%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

- a) Persentase peningkatan retribusi daerah

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.60
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Capaian	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi	Persentase peningkatan retribusi daerah	100%	61%	61

Indikator 1 : Persentase peningkatan retribusi daerah

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan pengoptimalisasian laboratorium pengujian dan tercapai 61%, dengan kegiatan optimalisasi laboratorium pengujian. Untuk peningkatan pendapatan retribusi ada beberapa kendala yang dihadapi oleh UPT Laboratorium. Yang pertama sumber daya manusia dan peralatan yang kurang lengkap, sumber daya manusia yang ada tidak mampu melakukan seluruh pengujian. Yang kedua adanya tarif retribusi yang masih murah. Tarif retribusi ini sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Laboratorium Pengujian Material Milik Dinas Pekerjaan Umum. Maka pada tahun 2020 dilakukan perubahan atas peraturan tersebut, yang diharapkan mampu menaikkan pendapatan atas sewa alat uji material konstruksi. Atas kondisi sebagaimana diatas maka peningkatan pendapatan pada sewa alat uji material konstruksi tahun 2019 tidak bisa memenuhi target, dari yang ditargetkan sebesar Rp. 88.000.000,- hanya mampu terealisasi sebesar Rp. 54.274.000,- atau 61%.

Sasaran 2 : Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- a) Program Pengembangan Teknologi Konstruksi, dengan anggaran sebesar Rp 99.941.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 55.930.250,- atau 57,97%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

1) Persentase alat uji material konstruksi yang dipenuhi

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.61
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2

SasaranStrategis	IndikatorSasaran	Target	Capaian	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya sarana dan prasarana alat uji material konstruksi	Persentase alat uji material konstruksi yang dipenuhi	5%	0	0

Indikator 1 : Persentase alat uji material konstruksi yang dipenuhi

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan optimalisasi laboratorium pengujian, Pada kegiatan ini UPT Laboratorium sudah menganggarkan untuk pembelian alat-alat laboratorium untuk melakukan pengujian material konstruksi. Alat – alat tersebut untuk melengkapi alat – alat laboratorium yang sudah ada. Sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui alat sewa uji material konstruksi. Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan harga alat-alat laboratorium tersebut, harganya sangat tinggi sehingga dana yang sudah dianggarkan tidak mencukupi. Oleh sebab itu tahun 2019 tidak ada dilakukan pembelian terhadap alat-alat laboratorium yang baru.. Atas permasalahan tersebut diatas UPT Laboratorium tidak mampu memenuhi sarana alat uji material konstruksi dari yang ditargetkan sebesar 100 % tidak dapat terealisasi.

F. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2019

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 dapat menyerap dana APBD dan Dana dari pusat (DAK) sebesar Rp 174.659.652.098 atau sebesar 92,78% dari pagu dana Rp 192,604,956,206 dengan capaian kinerja fisik sebesar 95,29%. Pada tahun 2019 terlihat bahwa telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran dimana hamper semua kinerja utama telah tercapai dari target yang telah ditentukan

dengan hanya menggunakan anggaran sebesar 92,78% dari anggaran yang tersedia.

2. Anggaran dan Realisasi menurut sasaran dan program

Tabel 3.62

Rincian Anggaran berdasarkan Program dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Presentase
			Rp	Rp	%
1	Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,076,906,560	4,921,761,525	80,99
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	641,887,600	604,038,000	94,10
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45,000,000	22,500,000	50
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	27,549,000	5,889,600	21,39
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2,520,000	2,520,000	100
2	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	9,999,750	6,904,200	69,04
3	Pelayanan Administrasi keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30,203,500	28,690,000	94,99
4	Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	32,192,612,086	31,147,733,652	96,75
5	Meningkatnya jembatan kondisi mantap Kabupaten	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	75,935,026,204	72,775,505,619	95,84
6	Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	8,042,611,776	7,211,388,462	89,66
7	Meningkatnya jembatan kondisi mantap Kabupaten	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	26,668,413,590	25,411,088,163	95,29
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	99,999,750	24,216,700	24,22
		Program Keciptakarya	14,812,217,990	14,025,724,000	94,69
		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	349,999,900	161,206,486	46,06
8	Meningkatkan dan mengoptimalkan infrastruktur jaringan irigasi	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Brojong	6,330,109,650	5,851,900,200	92,46
9	Meningkatkan infrastruktur pendayagunaan sumber daya air	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	17,234,577,500	13,900,191,150	80,65

10	Meningkatkan dan melakukan pemeliharaan saluran sungai	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Kerservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	1,525,000,000	907,991,400	59,54
11	Meningkatkan upaya pengendalian daya rusak air				
12	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	1,738,117,400	1,200,353,697	69,06
13	Meningkatnya Pemanfaatan Tanah Negara oleh Masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	68,140,000	25,410,000	37,29
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	46,625,000	24,360,000	52,25
14	Meningkatnya Penyelesaian Konflik/Sengketa tanah di kabupaten tanah laut	Program Penataan Tata Guna Tanah	53,710,000	13,575,000	25,27
		Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	48,296,000	14,958,000	30,97
15	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT Laboratorium (UPT Laboratorium)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	94,054,600	80,779,700	85,89
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	29,062,500	5,250,000	18,06
		Program Pengembangan Teknologi Konstruksi	99,941,200	55,938,250	55,97
17	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT Peralatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	402,374,650	229,778,294	57,11

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan 2019

Tabel 3.63
Analisis perbandingan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 dan 2019

No	2018		No	2019	
	Nama Program	Nama Kegiatan		Nama Program	Nama Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
		Penyediaan jasa administrasi keuangan			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Penyediaan Alat Tulis Kantor
		Penyediaan Alat Tulis Kantor			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Komponen Instalasi			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Penyediaan Makanan dan Minuman
		Penyediaan Makanan dan Minuman			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam Daerah
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya			Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Penyusunan Tabulasi Data Aset Tetap
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD	5	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Perencanaan pembangunan jalan	6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD
		Pembangunan jalan	7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
		Perencanaan pembangunan jembatan	8	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Perencanaan pembangunan jalan
		Pembangunan jembatan			Pembangunan jalan
7	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan			Perencanaan pembangunan jembatan
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan			Pembangunan jembatan
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK)	9	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
8	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan			Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
		Perencanaan pembangunan jalan dan jembatan pedesaan			Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK)
9	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong			Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Penugasan)
10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	10	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

				gorong	
		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi (Pendamping PAMSIMAS)	11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)			Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi (Pendamping PAMSIMAS)
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK)			Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK Reguler)
11	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pendamping PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)			Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK PENUGASAN)
12	Program Keciptakarya	Pembangunan Gedung Kantor			Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK Reguler)
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pendamping PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
13	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi	13	Program Keciptakarya	Pembangunan Gedung Kantor
14	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Brojong	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Brojong			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
15	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	14	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi
		Pembangunan Pintu Air	15	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Brojong	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Brojong
		Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	16	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
		Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun			Pembangunan Pintu Air
		Pemberdayaan Petani Pemakai Air			Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)			Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
16	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Kerserasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			Pemberdayaan Petani Pemakai Air
17	Program Perencanaan Tata Ruang	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
18	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	17	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Kerserasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

19	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	18	Program Perencanaan Tata Ruang	Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan tentang Rencana Tata Ruang
20	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan			Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
21	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Toponomi/Penamaan Rupa Unsur Administrasi Pemerintah			Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
TOTAL			19	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
	21	50	20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Toponomi/Penamaan Rupa Unsur Administrasi Pemerintah
TOTAL ANGGARAN			21	Program Penataan Tata Guna Tanah	Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah dan Fasilitas Umum
	194.690.926.613		22	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
			23	Program Pengembangan Teknologi Konstruksi	Identifikasi dan informasi teknik konstruksi
					Optimalisasi laboratorium pengujian
			TOTAL		
			23		55
			TOTAL ANGGARAN		
			192.604.956.206		

Tabel 3.64
Perbandingan Program dan Kegiatan APBD Tahun 2018 dan 2019

No	2018		No	2019	
	Nama Program	Nama Kegiatan		Nama Program	Nama Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 Kegiatan	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 Kegiatan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Kegiatan	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Kegiatan
3	Program peningkatan disiplin aparatur	2 Kegiatan	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Kegiatan
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Kegiatan	4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	1 Kegiatan
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	5	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1 Kegiatan
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	4 Kegiatan	6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan
7	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3 Kegiatan	7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Kegiatan
8	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	2 Kegiatan	8	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	4 Kegiatan
9	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1 Kegiatan	9	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4 Kegiatan
10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	4 Kegiatan	10	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1 Kegiatan

	dan Air Limbah				
11	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Kegiatan	11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5 Kegiatan
12	Program Keciptakarya	2 Kegiatan	12	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Kegiatan
13	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	1 Kegiatan	13	Program Keciptakarya	2 Kegiatan
14	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Brojong	1 Kegiatan	14	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	1 Kegiatan
15	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	6 Kegiatan	15	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Brojong	1 Kegiatan
16	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Kerservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	1 Kegiatan	16	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	6 Kegiatan
17	Program Perencanaan Tata Ruang	1 Kegiatan	17	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Kerservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	1 Kegiatan
18	Program pengendalian pemanfaatan ruang	1 Kegiatan	18	Program Perencanaan Tata Ruang	3 Kegiatan
19	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 Kegiatan	19	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 Kegiatan
20	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	1 Kegiatan	20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	1 Kegiatan
21	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	1 Kegiatan	21	Program Penataan Tata Guna Tanah	1 Kegiatan
			22	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1 Kegiatan
			23	Program pengembangan teknologi konstruksi	2 Kegiatan
	TOTAL			TOTAL	
	21	50		23	55

Tabel 3.65
Perbandingan APBD Tahun 2018 dan 2019

No	2018		2019	
	1.	Belanja langsung	194.690.926.613,00	Belanja langsung
2.	Belanja tidak langsung	8.542.955.000,00	Belanja tidak langsung	12.166.362.171,00
	Total	203.138.301.643,00	Total	204.761.318.377,00

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa adanya penurunan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, namun mampu melaksanakan sebanyak 23 program dan 55 kegiatan pada tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan pada belanja tidak langsung dibandingkan pada tahun 2018, dimana pada tahun 2018 untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.8.542.955.000 menjadi Rp. 12.166.362.171 pada tahun 2019. Kenaikan ini dikarenakan adanya kenaikan TPP pada tahun 2019 dan kenaikan gaji sebesar 5%. Selain itu Honorarium pejabat pengadaan, pejabat PPHP dan Tim PPHP sampai dengan September 2019.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja utama dan capaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut cukup memuaskan. Walaupun masih ada beberapa indikator yang capaiannya belum memenuhi target yang direncanakan.

Terlepas dari pencapaian kinerja yang terus membaik, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanah Laut masih akan terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur menjadi isu strategis yang utama bersama penguatan domestik *connectivity*, penguatan ketahanan pangan, penyediaan air minum serta terpadunya pengembangan kawasan dengan pembangunan infrastruktur dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.

Dari tahun ke tahun capaian ini terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Tanah Laut, serta membantu mewujudkan visi dan misi kepala daerah, Sehingga pembangunan yang dilaksanakan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Tanah Laut.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan dan menyelesaikan kegiatan tersebut dengan tepat waktu.
2. Melakukan koordinasi kepada semua pihak khususnya terkait pembangunan infrastruktur, sehingga pembangunan infrastruktur bisa tepat sasaran.
3. Melakukan pelelangan barang dan jasa sejak dini agar waktu pekerjaan

bisa lebih cepat dan meminimalkan resiko keterlambatan pekerjaan yang mempengaruhi kinerja serta manfaat pekerjaan bisa dirasakan lebih awal.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut



Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP . 19621002 198903 1 006